

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN  
PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI  
TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG  
(STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
KABUPATEN SINTANG)**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**ALBINA SRIPARSA**

**NIM. 018556715**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2016**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

**TAPM yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH  
LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI  
TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG  
MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)**  
adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah  
saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya  
penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, Februari 2016

Yang Menyatakan,



**ALBINA SRIPARSA**

**NIM. 018556715**

**ABSTRACT*****Implementation of the Integrated Crop Management Field School Program  
(SL-PTT) of Rice in 2013 in the District of Sintang  
(Study in Gurung Mali village Tempunak Sub District, District of Sintang)*****Albina Sriparsa****Universitas Terbuka**

asristg@gmail.com

**Key words : Implementation, SL-PTT (The Field School Program of  
Integrated Plantation Management)**

The program of SL-PTT is regulated through The Decision of General Director of Foods Plantation Number 6/HK.310/C/1/2013, SL-PTT purposed to realize sovereignty, security, endurance of foods through enhancement of agricultural production especially rice for the availabellity of society foods reserved. However, the program is not necessarily able to enhance rice production in according to the determined target.

This research is descriptive qualitative research using The Policy Implementation Theory approached according to Edward III that including communication, resources, attitude of implementer/disposision and the structure of bureaucracy. Results of this research found that the number of farming instructor is not ideal comparing to the number of village and the number of targeted group, the cultivation field is not on the same area, the dependent on seeds from outside area, and the farming group member is not all obtained production facilities over their farming activities.

Based on this research, recommanding to The Government of Sintang County to intensify of socialization and guidance towards the farmers, to increase the number of farming instructor, to redeveloppe seeding center in Sintang County, to spesifically regulate farming region in The Spatial and Territory Planning of Sintang County, to sign The Fact of Integrity for the farmers who involved in implementing The SL-PTT, and to compile Standard of Operating Procedurs (SOP) actuating The SL-PTT program.

## ABSTRAK

**Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu  
(SL-PTT) Padi Tahun 2013 Di Kabupaten Sintang  
(Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang)**

**Albina Sriparsa**

**Universitas Terbuka**

**asristg@gmail.com**

**Kata Kunci : Implementasi, SL-PTT**

Program SL-PTT diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013, SL-PTT bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, keamanan, ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pertanian khususnya padi dalam rangka tersedianya cadangan pangan masyarakat. Namun demikian, program dimaksud tidak serta merta mampu meningkatkan produksi padi sesuai target yang ditetapkan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana/disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil Penelitian menemukan bahwa belum idealnya jumlah penyuluh dibandingkan jumlah desa dan kelompok tani binaan, lahan pertanian tidak satu hamparan, dan ketergantungan suplai benih dari luar daerah serta belum semua anggota kelompok tani mendapat saprodi pada kegiatan pertaniannya.

Sesuai penelitian maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang supaya lebih intensif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada petani, menambah jumlah tenaga penyuluh Pertanian, menumbuhkan kembali sentra benih di Kabupaten Sintang, mengatur secara khusus kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sintang, membuat pakta integritas bagi petani pendukung pelaksana Program SL-PTT, serta menyusun SOP pelaksanaan Program SL-PTT.

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN  
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT)  
PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI  
DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
KABUPATEN SINTANG)**

Penyusun TAPM : **ALBINA SRIPARSA**  
NIM : **018556715**  
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**  
Hari/Tanggal : **SABTU, 6 FEBRUARI 2016**

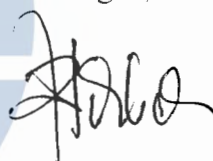
Menyetujui:

Pembimbing I,



**DR. Hj. Hardilina, M.Si**  
NIP. 195906141985032001

Pembimbing II,



**Ir. Ida Zubaedah, MA, Ed.D**  
NIP. 196208031989032002

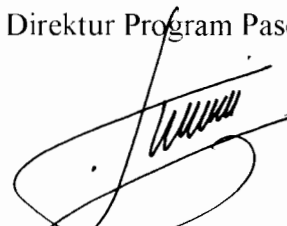
Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Program Magister Administrasi Publik



**DR. Darmanto, M. Ed**  
NIP. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana



**Suciati, M.Sc, Ph.D**  
NIP. 195202131985032001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : ALBINA SRIPARSA  
 NIM : 018556715  
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
 Judul TAPM : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN  
 PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT)  
 PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG  
 (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN  
 TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 6 Februari 2016  
 Waktu : 16.45 – 18.15 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Tanda Tangan

**Ketua Komisi Penguji**

DR. Tati Rajati, M.M  
 NIP. 195908241986022001

**Penguji Ahli**

Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D  
 NIP. 195605052000121001

**Pembimbing I**

DR. Hj. Hardilina, M.Si  
 NIP. 195906141985032001

**Pembimbing II**

Ir. Ida Zubaidah, MA, Ed.D  
 NIP. 196208031989032002

LEMBAR PERSEMBAHAN

*Yang Pertama dan Utama*

*kepada Yesus Kristus Juru Selamatku, karena Engkulah pemilik hidupku,*

*tanpaMu tiada artinya aku dan semuanya karena kuasa Mu*

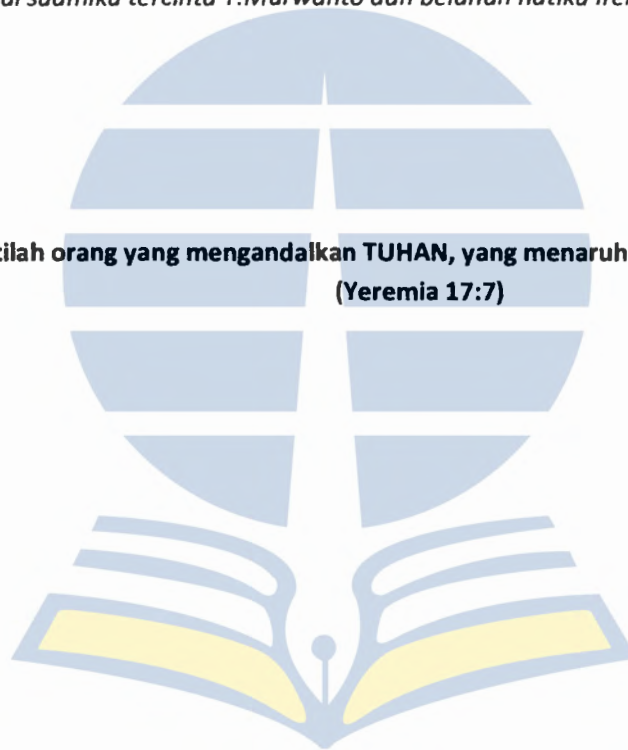
*Orang Tua ku tercinta , Bapak Suan Rumban dan Mama Mariana, Bapak F. Kasimin dan Ibu Minarsih*

*Saudara-saudariku terkasih, lea, ina, yahya, ivan, tini, ayus,mbak budi dan mas dedy*

*Ponakanku tersayang, acel, cley, rissa, jovi dan jordy*

*Terspecial suamiku tercinta Y.Murwanto dan belahan hatiku Irenna Octarosary Murwanto.*

**"Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!"  
(Yeremia 17:7)**



## KATA PENGANTAR

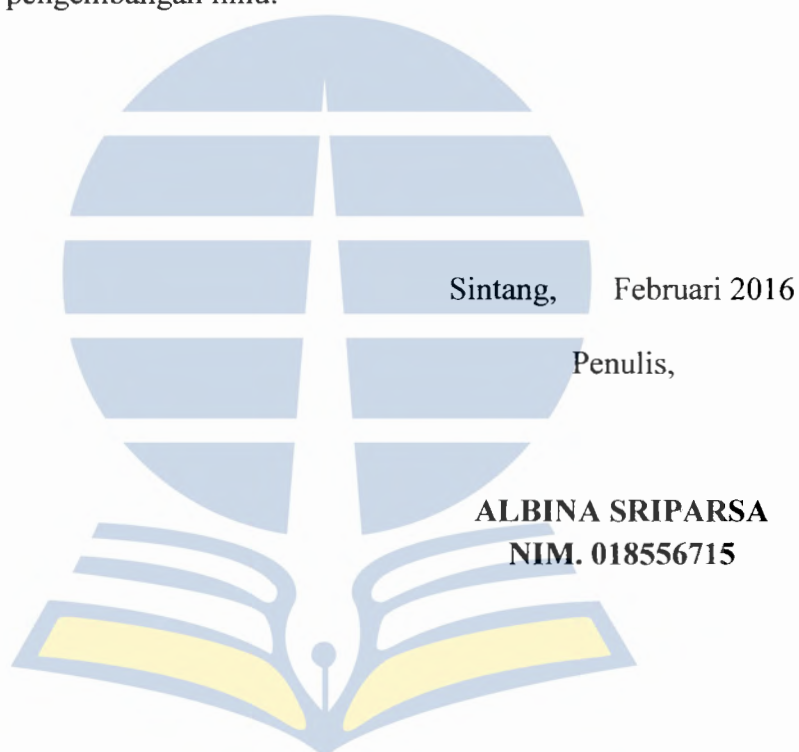
Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains untuk Program Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
2. DR. Tati Rajati, M.M selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I Ibu DR. Hj. Hardilina, M.Si dan Pembimbing II Ir. Ida Zubaedah, MA, Ed.D yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. DR. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu/Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
5. Bapak Pheni Chalid, SF, MA, Ph.D selaku Penguji Ahli
6. Orang Tua dan Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral



7. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sintang beserta jajaran, Penyuluh Lapangan dan Ketua Kelompok Tani Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



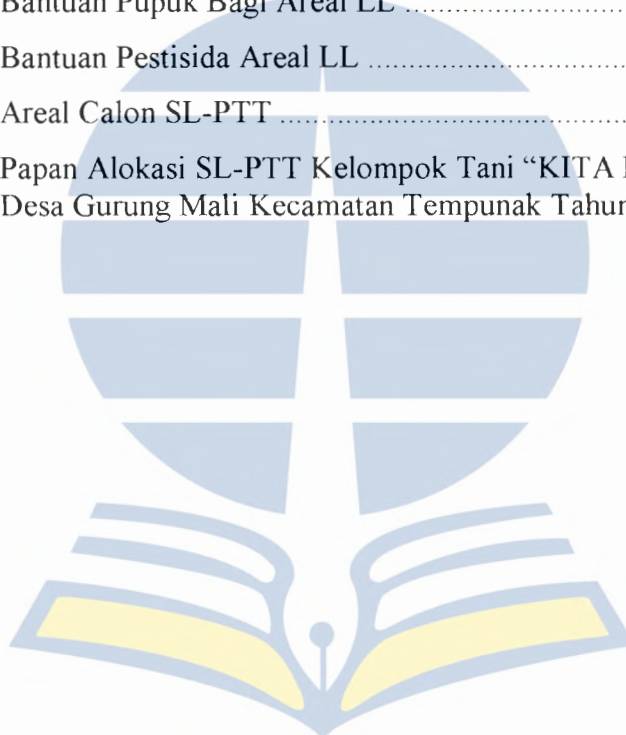
## DAFTAR ISI

	Hal
<i>ABSTRACT</i> .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Kajian Teoritis .....	10
1. Konsep Implementasi Kebijakan .....	10
a. Komunikasi .....	12
b. Sumber Daya .....	16
c. Disposisi .....	17
d. Struktur Organisasi .....	18
2. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) .....	20
B. Kerangka Berpikir .....	28
C. Penelitian Terdahulu .....	31
BAB III    METODOLOGI PENELITIAN .....	35
A. Desain Penelitian .....	35
B. Informan .....	36
C. Instrumen Penelitian.....	37
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	38
E. Metode Analisis Data .....	39
BAB IV    TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Kondisi Geografis.....	41

2. Kependudukan.....	44
3. Pertanian.....	46
B. Implementasi Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.....	48
1. Komunikasi.....	49
a. Transmisi.....	52
b. Kejelasan.....	58
c. Konsistensi.....	63
2. Sumber Daya.....	64
a. Staf.....	65
b. Fasilitas.....	73
c. Informasi.....	84
d. Kewenangan.....	87
3. Disposisi atau Kesiediaan.....	89
4. Struktur Birokrasi.....	93
a. <i>Standart Operating Procedurs (SOP)</i> .....	93
b. Fragmentasi.....	95
BAB V   SIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
Lampiran :	
1. Pedoman Wawancara	
2. Check List Observasi	
3. Transkrip Hasil Wawancara	
4. Photo Penelitian	
5. Biodata	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Hal</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	33
Gambar 4.1 Peta Letak Desa Gurung Mali	41
Gambar 4.2 Skema Operasional SL-PTT .....	48
Gambar 4.3 Sosialisasi SL-PTT .....	55
Gambar 4.4 Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT Tahun 2012 .....	60
Gambar 4.5 Bantuan Pupuk Bagi Areal LL .....	73
Gambar 4.6 Bantuan Pestisida Areal LL .....	75
Gambar 4.7 Areal Calon SL-PTT .....	80
Gambar 4.8 Papan Alokasi SL-PTT Kelompok Tani “KITA BERSATU” Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Tahun 2013 .....	84



## DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 1.1	Lokasi Kecamatan Penerima SL-PTT Padi Inbrida Sawah dan Padi Inbrida Lahan Kering Tahun 2013.....	4
Tabel 4.1	Luas wilayah Per Desa di Kecamatan Tempunak .....	42
Tabel 4.2	Luas Lahan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tempunak Tahun 2013 .....	43
Tabel 4.3	Penduduk Menurut Persentase Keluarga Pertanian di Kecamatan Tempunak Tahun 2013.....	44
Tabel 4.4	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi di Kecamatan Tempunak Tahun 2013.....	45
Tabel 4.5	Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tempunak Tahun 2013.....	46
Tabel 4.6	Ketersediaan Petunjuk Teknis atau Buku Pedoman SL-PTT di Desa Gurung Mali .....	62
Tabel 4.7	Penetapan Petugas Penyuluh Lapangan untuk Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kecamatan Tempunak tahun 2013.....	66
Tabel 4.8	Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kecamatan Tempunak Tahun 2013.....	69
Tabel 4.9	Penetapan Lokasi Desa untuk Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu Kecamatan Tempunak (SL-PTT) Tahun 2013.....	78
Tabel 4.10	Lahan Pertanian Di Desa Gurung Mali Pada Program SL-PTT Yang Terletak Dalam Satu Kelompok .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Check List Observasi
Lampiran 3	Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 4	Photo Penelitian
Lampiran 5	Biodata



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta akses pekerjaan yang layak sehingga mempunyai penghasilan yang layak. Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan akan pangan yang merupakan terutama kebutuhan yang paling dasar berupa makanan dan minuman yang layak menuntut adanya sebuah kebijakan yang unggul dan komprehensif dalam pengelolaan pangan agar terciptanya ketahanan dan swasembada pangan. Dalam mewujudkan hal dimaksud, pemerintah selaku pemegang otoritas melakukan berbagai intervensi melalui berbagai regulasi berkenaan dengan hal-hal strategis pembangunan pertanian salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Komoditi tanaman pangan merupakan salah satu bagian utama dari sektor pertanian, oleh karena itu dalam upaya pengamanan komoditas tanaman pangan, pemerintah setiap tahunnya selalu sektor pertanian menempatkan sebagai hal utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Salah satu komoditi utama tanaman pangan adalah padi. Komoditi ini berperan sebagai pemenuh kebutuhan pokok karbohidrat masyarakat dan bahan baku industri.

Ketersediaan komoditas pangan terutama padi sangat diperlukan sepanjang tahun terutama sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya, maka upaya peningkatan produksi yang

dilaksanakan oleh pemerintah selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, juga merupakan salah satu tugas utama pemerintah dalam penyediaan bahan pangan pokok masyarakat.

Menurut Khudori salah seorang Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat sebagaimana dalam <http://biotaniindonesia.blogspot.com/2013/10/pangan-tidak-jelek-tapi-impor-meningkat.html> yang diambil pada tanggal 1 April 2014 menyatakan bahwa Produksi 69,27 juta ton gabah (39,48 juta ton beras, konversi 0,57, naik 0,31%). Jika konsumsi 113,5 kg/kapita, total konsumsi 250 juta penduduk adalah 28,25 juta ton. Apabila membandingkan jumlah konsumsi masyarakat dan produksi pangan yang ada maka secara umum Negara Indonesia seharusnya telah swasembada beras dan tidak perlu mengimpor, bahkan surplus dan dapat melakukan ekspor.

Namun kondisi tersebut bertolak belakang dengan laporan Amanda Puspita Sari dari CNN Indonesia sebagaimana dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20140809160536-92-1344/ini-rincian-impor-beras-di-indonesia-2013-2014/>, yang diambil pada 1 September 2014 menyatakan bahwa impor beras di Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sepanjang Januari hingga Juni 2014, impor beras mencapai 176.227 ton atau senilai US\$ 76,2 juta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memerlukan usaha keras untuk memperkuat dan meningkatkan pertahanan pangan. Salah satu upaya nyata pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara merata adalah melalui program sekolah lapangan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013 Tentang



Pedoman Umum Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Tujuan SL-PTT adalah dalam rangka ketahanan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka perlu diupayakan peningkatan produksi tanaman pangan dan untuk mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi dan jagung tahun 2013. Berangkat dari hal tersebut maka dapat dipahami bahwa sasaran pokok bidang pertanian tanaman pangan yang harus dicapai adalah peningkatan produksi komoditi padi.

Program SL-PPT juga mempunyai posisi strategis karena Program tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian yang difokuskan pada pengembangan ketahanan pangan, agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani. Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu padi, dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan petani. Dalam satu unit SL-PTT Padi yang luasan 25 ha yang terbagi ke dalam laboratorium lapangan (LL) 1 hektar dan wilayah hamparan Sekolah Lapang (SL) 24 hektar.

Sebagai sebuah program nasional, maka program tersebut juga berlaku untuk berbagai daerah termasuk di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Berbagai program dalam meningkatkan produktifitas pangan di Kabupaten Sintang salah satunya melalui berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas dengan melaksanakan Pengelolaan Tanaman Terpadu maupun peningkatan mutu intensifikasi pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sejak tahun 2008.

Adapun alokasi bantuan program SL-PTT di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Lokasi Kecamatan Penerima SL-PTT Padi Inbrida Sawah dan padi Inbrida Lahan Kering Tahun 2013**

No	Kecamatan	Jumlah Lokasi		Luas Areal (Ha)		Jumlah Kebutuhan Benih (Kg)	
		Sawah	Lahan Kering	Sawah	Lahan Kering	Sawah	Lahan Kering
1	Ketungau Hulu	10	13	250	325	6.250	8.125
2	Ketungau Hilir	1	7	25	175	625	4.375
3	Ketungau Tengah	6	10	150	250	3.750	6.250
4	Binjai	6	1	150	25	3.750	625
5	Sepauk	74	17	1.850	425	46.250	10.625
6	Sintang	12	2	300	50	7.500	1.250
7	Kelam Permai	28	12	700	300	17.500	7.500
8	Sungai Tebelian	19	3	475	75	11.875	1.875
9	Ambalau	2	4	50	100	1.250	2.500
10	Dedai	57	3	1.425	75	35.625	1.875
11	Kayan Hilir	53	15	1.325	375	33.125	9.375
12	Serawai	8	16	200	400	5.000	10.000
13	Kayan Hulu	21	7	525	625	13.125	4.375
14	Tempunak	63	10	1.575	250	39.375	6.250
<b>Jumlah</b>		<b>360</b>	<b>120</b>	<b>9.000</b>	<b>3.025</b>	<b>225.000</b>	<b>75.625</b>

Sumber : Surat Keputusan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab. Sintang. Tahun 2013.

Program peningkatan produksi padi di Kabupaten Sintang dititik beratkan pada upaya peningkatan mutu intensifikasi, mengingat pelaksanaan program ekstensifikasi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Harapan dengan dilaksanakannya SL-PTT di Kabupaten Sintang adalah meningkatnya produksi padi berdasarkan target yang telah dihitung dengan seksama sebelumnya. Mengacu pada tabel 1.1 di atas, Kecamatan Tempunak merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai Luas Sawah yang cukup

tinggi potensi untuk dikembangkan menjadi sentra penghasil padi yang mencapai 1.820 Ha.

Pada tahun 2013 Kecamatan Tempunak telah melakukan penanaman padi melalui Program SL-PTT yang berlokasi di 14 desa, dengan luasan tanam mencapai 1.250 Ha dan produksi mencapai 4.820 ton. Namun untuk luasan panen sebagaimana di atas target yang telah ditentukan sebesar 5.576 ton belum tercapai. Setidaknya selisih dari target mencapai 756 ton. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Program SL-PTT sudah berjalan namun pencapaian produksinya belum sesuai yang diharapkan.

Dari selisih antara target dan hasil produksi sebesar 756 ton apabila dibagi dengan jumlah rata-rata konsumsi masyarakat per orang sebesar 113,5 kilogram pertahun maka dapat memenuhi lebih dari 6.660 orang per tahun di Kecamatan Tempunak atau **24,13 persen** dari total jumlah penduduk Kecamatan Tempunak. Merujuk pada data tersebut dapat dipahami bahwa bahwa Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak belum berjalan maksimal sehingga menarik untuk diteliti mengingat apabila program SL-PTT di Kecamatan Tempunak dapat dilaksanakan sesuai dengan target maka Kecamatan Tempunak akan swasembada beras dan mempunyai surplus beras lebih dari 2.443 ton per tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam konteks Program SL-PTT sebagai sebuah kebijakan dan belum tercapainya target produktivitas hasil padi melalui Program SL-PTT, maka beberapa hal yang dapat mempengaruhi implementasi program dimaksud antara lain yaitu:

1. Substansi Program SL-PTT tersebut belum sepenuhnya dimengerti oleh kelompok petani sehingga petani belum mempraktekan bagaimana seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan.
2. Sumber daya berupa pendamping atau penyuluh yang belum mampu maksimal melakukan pendampingan dan peralatan serta fasilitas lainnya yang belum memadai.
3. Seberapa besar seluruh pihak terutama kelompok sasaran mendukung menerima dan bersedia melaksanakan Program SL-PTT tersebut, dan
4. Standar Pelaksanaan Operasional kegiatan diberbagai tingkatan serta ada tidaknya tindakan-tindakan yang dapat menghambat koordinasi pelaksanaan program SL-PTT tersebut.

Berangkat dari fenomena di atas maka penulis merasa sangat tertarik untuk menelitinya yang dituangkan dalam Judul : “IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu Implementasi Program SL-PTT Padi di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang pada Tahun 2013 belum mampu mencapai target produksi.

Berangkat dari perumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah “Mengapa Implementasi Program Sekolah Lapangan

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang) belum mampu mencapai target produksi?".

Mengacu pada Pertanyaan penelitian di atas serta untuk memperjelas dan memfokuskan arah penelitian ini, maka penulis merumuskannya dalam sub-sub pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pola Komunikasi dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang)?
2. Sejauh mana ketersediaan sumber daya dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang)?
3. Bagaimana dukungan atau dispoisisi para pihak yang terlibat dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang)?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang)?

### C. Tujuan Penelitian

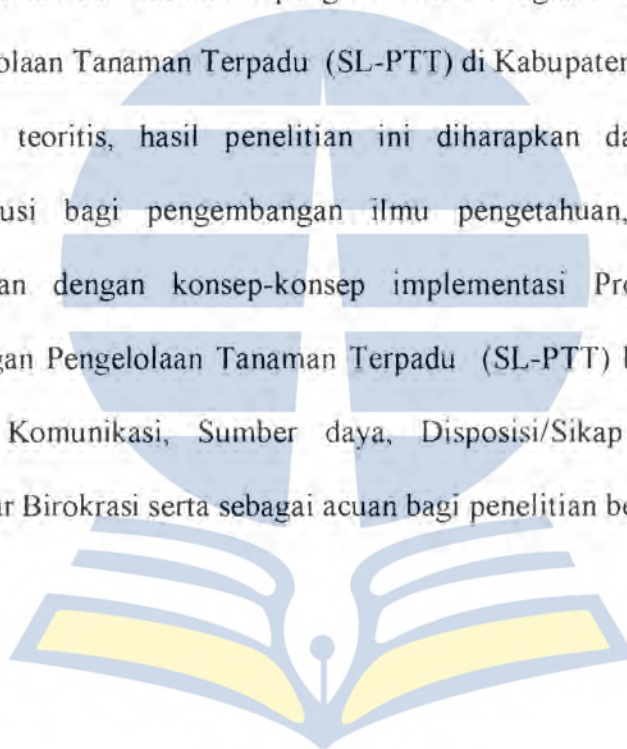
Mengacu pada latar belakang masalah dan perumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, yang terdiri dari:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis komunikasi dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang).
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sumber daya dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang).
3. Mendeskripsikan dan menganalisis disposisi atau sikap pelaksana dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang).
4. Mendeskripsikan dan menganalisis struktur birokrasi dalam Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun 2013 Kabupaten Sintang (Studi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi terkait terutama Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sintang lainnya dalam meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan melalui Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Sintang.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan konsep-konsep implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) berkenaan dengan aspek Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi serta sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara garis besar, munculnya kebijakan publik melalui tiga tahap yaitu tahap formulasi, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Dalam banyak sistem pemerintahan negara, kebijakan publik diimplementasikan oleh lembaga-lembaga negara, hal ini disebabkan oleh pemerintahlah yang merumuskan, melaksanakan dan harus mengevaluasi keberhasilan kebijakan tersebut.

Tahap paling krusial dalam suatu siklus kebijakan publik adalah tahap implementasi karena pada tahap ini justru banyak permasalahan muncul yang pada saat formulasi kebijakan tidak muncul. Meskipun kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan namun bukan jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti akan berhasil dalam implementasinya di lapangan. Ada banyak variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik baik yang bersifat perseorangan/individual maupun kelompok bahkan institusi. Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan seberapa matangya perencanaan dibuat dan evaluasinya.

Abidin (2012) menyatakan bahwa implementasi mempunyai kecenderungan mengarah kepada pendekatan *top-down* yang sangat sentralistis karena implementasi mempunyai pengertian melaksanakan



apa yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan. Namun dalam suatu negara yang demokratis dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara atau dengan kata lain bahwa rakyat ada pemilik negara sehingga peranan rakyat harus diakomodir dan diindahkan. Dalam hal ini pengertian masyarakat sebagai publik tidak boleh tertutupi dengan pengertian negara sebagai publik.

Model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dalam Tachjan (2006:39) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* menyatakan bahwa:

kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (5) sikap para pelaksana, (6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Pendapat ahli tersebut menyatakan bahwa kinerja kebijakan publik dipengaruhi beberapa hal penting terutama harus ada standar dan sasaran yang jelas, ketersediaan sumber daya, serta komunikasi antara organisasi. Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Edward III dalam Winarno (2012:177-210), namun menjelaskan lebih rinci berkenaan dengan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain adalah (1) Komunikasi yang terdiri dari transmisi, kejelasan dan konsistensi, (2) Sumber Daya yang terdiri dari staf, fasilitas, kewenangan dan informasi, (3) Disposisi atau sikap pelaksana dan (4) Struktur Birokrasi yang terdiri dari *Standart Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

Setelah membandingkan beberapa teori menurut para ahli di atas, maka penulis memilih teori implementasi kebijakan menurut Edward III karena pengelompokan variabel-variabel yang lebih jelas sehingga lebih mudah untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Komunikasi**

Implementasi kebijakan menurut Purwanto (21:2012) adalah:

implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan Kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan

Dari pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa dalam implementasi kebijakan setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu implementer dan kelompok sasaran. Implementer sebagai pihak yang melakukan distribusi, menyalurkan, dan menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dalam rangka mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Hal lain yang menjadi penekanan di atas adalah bahwa tujuan kebijakan akan dapat dicapai mempersyaratkan dua hal yaitu (1) keluaran kebijakan tersebut diterima oleh kelompok sasaran dengan baik, dan (2) bahwa keluaran kebijakan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran.

Apabila melihat uraian di atas maka untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan program mempersyaratkan komunikasi yang sangat baik. Waerren Weaver

dalam Rahman (2007) mengemukakan komunikasi adalah semua prosedur dengan mana pemikiran seorang dapat mempengaruhi yang lainnya. Dari pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi tidak lain adalah bertujuan mempengaruhi seseorang dengan melibatkan berbagai prosedur sehingga orang yang menerima pesan dari penyampai pesan dapat berbuat sesuai dengan keinginan pemberi pesan. Selain mempengaruhi orang lain, hal penting dari pendapat ahli di atas adalah adanya prosedur yang ada dalam komunikasi, sehingga dapat dimaknai bahwa dalam prosedur tersebut ada cara-cara, tahapan-tahapan, batasan-batasan dan alat-alat yang digunakan secara sistematis untuk memanipulasi orang lain sehingga mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemberi pesan.

Komunikasi menurut Bungin (2006:57) menjelaskan bahwa:

Komunikasi sebagai sebuah proses memaknai oleh seseorang (I) terhadap informasi, sikap dan perilaku orang (II) lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku, perasaan-perasaan, sehingga seseorang (I) membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pengalaman yang dia (I) alami. Fenomena komunikasi pula dipengaruhi oleh media yang digunakan, sehingga media kadangkala juga ikut mempengaruhi isi informasi (I) dan penafsiran (II).

Dari pendapat ahli di atas, jelas bahwa komunikasi melibatkan setidaknya orang pertama (I) dan orang kedua (II). Komunikasi dimaksud merupakan sebuah proses yang mempunyai pengertian terjadi secara terus menerus terhadap informasi, sikap dan perilaku orang lain yang dalam hal ini yang dijadikan model atau bahkan merupakan orang yang menyampaikan informasi itu sendiri. Dari

pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa informasi yang diterima, sikap dan perilaku yang dilihat oleh seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk bereaksi menyerupai orang sebelumnya. Hal tersebut juga berdampak pada bertambahnya pengetahuan, cara berbicara dan bergerak seseorang, sikap dan motivasi sehingga orang tersebut dapat melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dialaminya. Sehingga pada hakikatnya dampak dari komunikasi tersebut adalah tidak lain untuk mengubah perilaku orang tersebut. Hal lain yang turut mempengaruhi keutuhan substansi dan isi komunikasi adalah media yang digunakan dalam komunikasi itu sendiri karena penggunaan media yang kurang tepat dapat menyebabkan komunikasi menjadi bias sebagai akibat isi komunikasi dan penafsiran menghasilkan persepsi berbeda.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi harus memperhatikan bagaimana interaksi pihak yang terlibat, prosedur yang digunakan, media yang dipilih, dan substansi informasi yang disampaikan. Berknaan dengan komunikasi dalam kebijakan, Edward III dalam Winarno (2012) menjelaskan bahwa komunikasi terdiri dari transmisi, konsistensi dan kejelasan.

#### 1) Transmisi

Dalam rangka implementasi kebijakan untuk mendapat hasil maksimal maka diperlukan kondisi di mana masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat memahami isi kebijakan

dengan cara menyampaikan informasi yang memadai melalui sebuah proses transmisi. Transmisi adalah salah satu bagian dari komunikasi dimana pada transmisi ini mementingkan adanya penyaluran atau perpindahan pemahaman dari komunikator (pihak yang menyampaikan pesan) kepada komunikan (pihak penerima pesan).

Perpindahan dan penyaluran komunikasi dari komunikan ke komunikator yang baik akan menghasilkan suatu persamaan persepsi antara pembuat kebijakan dan implementor di lapangan sehingga proses implementasi akan berlangsung baik pula. Namun demikian sering pula terjadi salah komunikasi atau salah pengertian yang menyebabkan apa yang disampaikan oleh pembuat kebijakan ditafsirkan dan dilaksanakan secara berbeda oleh implementor di lapangan yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terdistorsinya esensi dan substansi kebijakan tersebut di tengah proses implementasi.

## 2) Kejelasan

Apabila aspek transmisi telah dilakukan, aspek lainnya yang turut menentukan dalam komunikasi kebijakan adalah aspek kejelasan bagaimana kebijakan akan dilaksanakan. Aspek kejelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang akan diimplementasikan akan dilaksanakan sebagaimana yang

diharapkan dan memastikan bahwa komunikasi Komunikasi yang diterima oleh implementor kebijakan harus jelas dan tidak dan mempunyai arti yang ambigu dan dapat diartikan secara berbeda.

Untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan berjalan sebagaimana mestinya maka perlu adanya petunjuk-petunjuk bagaimana kebijakan harus dilaksanakan berupa buku panduan sebagai acuan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan.

### 3) Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan juga sangat berpengaruh pada keefektifan implementasi sebuah kebijakan. Pertentangan antara perintah, petunjuk, dan peraturan merupakan sesuatu yang semestinya dihindari. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah maka akan menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan kebijakan.

## b. Sumber Daya

Membahas sumber daya dalam konteks kebijakan berarti tidak dapat melepaskan diri dari pengertian sumber daya dalam organisasi yang harus diatur dengan prinsip-prinsip manajemen secara seksama. Secara umum, sumber daya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Namun apabila

sumber daya ditelaah menurut sudut pandang manajemen, Manullang (2009:5) menyatakan bahwa “sarana (*tools*) atau alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah *men, money, materials, machines, methods, dan markets*. Kesemuanya itu adalah sumber daya”.

Pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi bahkan sebuah kebijakan, hal mutlak yang harus ada adalah manusia yang mempunyai kualifikasi dan kualitas yang baik, dukungan keuangan yang memadai, material yang cukup, mesin yang memadai, metode kerja yang sesuai dan tersedianya pasar. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya yang terdiri dari staf, informasi, kewenangan dan fasilitas

### c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan kecenderungan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Winardi dalam Torang (2014:52) menyatakan bahwa setidaknya ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi secara langsung perilaku individu, yaitu (1) individual, (2) keorganisasian, dan (3) psikologikal.

Merujuk pada pendapat ahli di atas maka dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai maka harus didukung oleh individu yang (1) mempunyai alasan, motif serta konsep yang sama dengan pembuat kebijakan, (2) adanya pengorganisasian individu-individu secara tepat, dan (3) kondisi secara psikologis individu tersebut. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Membahas birokrasi berarti tidak akan terlepas dari pengertian organisasi secara utuh, sehingga untuk memahami bagaimana suatu birokrasi berkerja maka harus menemukan sebuah organisasi yang secara nyata ada. Organisasi menurut definisi Manullang (60:2009) adalah:

- (a) Organisasi dalam arti badan atau sekelompok orang yang berkerjasama untuk mencapai suatu atau tujuan tertentu.
- (b) Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan, kerja sama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan”.

Dari pendapat ahli tersebut ada dua pengertian dasar organisasi, yaitu (1) organisasi sebagai sebuah badan atau lembaga



atau institusi yang di dalamnya ada sekumpulan orang yang berkerja sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada definisi ini organisasi dilihat sebagai wadah dan tempat berkumpulnya beberapa orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sedangkan (2) definisi berikutnya melihat organisasi sebagai bagan atau struktur dengan skema tertentu yang mempunyai pola kerja sama tertentu yang juga ingin mencapai tujuannya pula, sehingga ada pembagian peran dan porsi pekerjaan setiap komponen atau individu dalam organisasi yang tertuang dan tampak dalam tingkatan hirarki tertentu.

Berkenaan dengan organisasi sebagai bagan atau struktur yang berupa gambaran skematis yang menggambarkan hubungan dan kerjasama antara setiap individu atau komponen yang ada di organisasi tersebut, Gudono (4:2012) menyatakan bahwa:

agar pencapaian tujuan bisa dilakukan secara efisien, koordinasi kegiatan membutuhkan struktur yang rasional dimana ada pihak yang diberi otoritas sebagai penguasa (untuk memberi perintah-*command*) dan ada yang menjadi yang dikuasai (untuk menjalankan perintah). Dalam hal ini staff administrasi berfungsi menjalankan kepentingan dan menjadi penghubung antara *the ruller* dan *the ruled*. Begitulah asal usul birokrasi.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat dipahami beberapa hal antara lain adalah (1) organisasi pasti punya tujuan, (2) untuk mencapai tujuan maka setiap bagian dalam organisasi memerlukan koordinasi yang efisien, (3) organisasi mutlak memerlukan sebuah struktur organisasi yang rasional, dan (4) dalam organisasi

mempunyai struktur hirarki dimana ada mempunyai otoritas yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan ada pihak yang melaksanakan perintah. Berangkat dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah seperangkat aturan atau prosedur dalam organisasi yang mengatur tata kerja setiap komponen organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan efisien.

Pada tahap mengimplementasikan suatu kebijakan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terdiri SOP dan fragmentasi organisasi.

## 2. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan merupakan komponen dasar dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Konsekuensi logis dari fakta tersebut adalah munculnya suatu kewajiban bagi negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah bahkan hingga sampai tingkat perorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berkesinambungan dengan memanfaatkan segenap sumber daya, kelembagaan maupun sumber daya lokal yang ada.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan bagi manusia sebagai makanan dan minuman manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan bahan makanan dan minuman. Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Sehingga dari sisi ketahanan pangan nasional fungsinya sangat penting dan strategis.

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai pada perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, keamanan, keberagaman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan budaya, agama serta keyakinan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produksi secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk (1) meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri; (2) menyediakan pangan yang beraneka ragam memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; (3) mewujudkan

tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (4) mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; (5) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam dan luar negeri; (6) meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; (7) meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan dan pelaku usaha pangan; dan (7) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Untuk mencapai ketahanan pangan, salah satu upaya yang harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan produksi pangan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Upaya meningkatkan produksi padi dan jagung difokuskan pada penerapan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan sehingga diharapkan persediaan pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan nasional serta impor apabila kedua sumber sebelumnya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam negeri.

Program SL-PTT dilaksanakan di desa sehingga mempunyai keterkaitan erat dengan cadangan pemerintah desa yang mana persediaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan

masyarakat desa. Ketahanan pangan di tingkat desa sangat penting untuk mencegah kondisi kelangkaan pangan yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, serta konflik sosial/perang.

Program SL-PTT yang telah dimulai sejak tahun 2008 dan telah berhasil menjadi salah satu pemicu dalam meningkatkan produksi padi dan jagung. Pelaksanaan SL-PTT mendapat fasilitas/dukungan persediaan benih Padi Non-Hibrida, Padi Hibrida, Padi Gogo dan Jagung Hibrida melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Untuk menunjang peningkatan produksi padi dan jagung secara berkelanjutan maka SL-PTT diharapkan menjadi ajang bagi petani dalam mengaplikasikan berbagai teknologi usaha tani melalui penggunaan input yang efisien menurut spesifikasi lokasi.

Pada tahun 2013 Sasaran produksi melalui SL-PTT padi adalah sebesar 72.063.735 ton GKG dan sasaran produksi jagung sebesar 19.831.047 ton PK diupayakan dapat dicapai untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Karena itu diperlukan upaya peningkatan produksi yang luar biasa untuk mencapai sasaran tersebut. Pelaksanaan SL-PTT sebagai pendekatan pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi dan jagung nasional telah terbukti, namun ke depan dengan tantangan yang lebih beragam maka perlu penyempurnaan dan peningkatan kualitas.

Khusus pelaksanaan SL-PTT padi selain mengikuti pola sudah diterapkan selama ini berupa 1 Ha (LL) mendapat dukungan faktor

produksi lengkap pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan produktifitas dan atau peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

SL-PTT merupakan sekolah lapang bagi petani dalam menerapkan berbagai teknologi usaha tani melalui penggunaan input produksi yang efisien menurut spesifikasi lokasi. Petani belajar langsung di Lapangan melalui pembelajaran dan penghayatan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali), menghadapi dan memecahkan masalah terutama dalam hal teknik budi daya dengan mengkaji secara bersama berdasarkan spesifik lokasi.

Upaya peningkatan produksi melalui penerapan SL-PTT akan difokuskan melalui pola pertumbuhan, pengembangan dan pematapan dengan pendekatan kawasan skala luas, terintegrasi dari hulu sampai hilir, peningkatan jumlah paket bantuan sebagai instrumen stimulan, serta dukungan pendampingan dan pengawalan.

Luas SL-PTT Padi tahun 2013 adalah 4.625.000 hektar, yang dialokasikan pada kawasan pertumbuhan (padi pasang surut, padi rawa lebak, padi lahan kering dan padi sawah) seluas 297.900 hektar, kawasan pengembangan (padi sawah, padi hibrida dan padi lahan kering) seluas 589.700 hektar dan luas kawasan pematapan (padi sawah dan padi lahan kering) seluas 3.737.400 hektar. Sedangkan SL-PTT Jagung seluas 260.000 hektar, dialokasikan pada kawasan pertumbuhan (jagung hibrida dan jagung komposit) seluas 54.700 hektar, kawasan pengembangan

(jagung hibrida) seluas 170.300 ha dan kawasan pemantapan (jagung hibrida) seluas 35.000 hektar.

Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali), menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi.

Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam melakukan budidaya di lahan usahatannya berdasarkan spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahatannya dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung. Namun demikian wilayah di luar SL-PTT harus tetap dilakukan pembinaan, pendampingan dan pengawalan sehingga produksi dan produktivitas tetap dapat meningkat. Dengan fasilitasi tersebut diharapkan pelaksanaan SL-PTT berbasis kawasan skala luas dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas dan produksi tahun 2013. Agar upaya pencapaian sasaran produksi padi dan jagung melalui kegiatan SL-PTT tahun 2013 dapat tercapai, maka perlu untuk menyusun Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan.

Strategi peningkatan produksi tanaman sereal Program SLPTT Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Produktivitas.

Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pemakaian benih varietas unggul bermutu produktivitas tinggi termasuk benih padi hibrida dan jagung hibrida, sistem jarak tanam jajar legowo, pemupukan berimbang dan pemakaian pupuk organik serta pupuk bio-hayati, pengelolaan pengairan dan perbaikan budidaya disertai pengawalan, pendampingan, pemantauan dan koordinasi, dll. Strategi ini terutama dilaksanakan di wilayah dimana perluasan areal sudah sulit dilakukan, sehingga dengan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan masih dapat ditingkatkan produktivitasnya. Hal lain yang dapat diterapkan adalah dengan mengurangi potensi kehilangan hasil melalui penanganan panen dan pasca panen yang lebih baik.

b. Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan.

Perluasan areal dilakukan melalui upaya optimalisasi lahan melalui upaya perbaikan seperti JITUT, JIDES, dan Tata Air Mikro, pompanisasi dan penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru), disertai konservasi lahan yang berkelanjutan serta peningkatan indeks pertanaman dan pengelolaan air irigasi.

c. Pengamanan Produksi.

Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan serta



pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar.

d. Penyempurnaan Manajemen.

Manajemen yang telah ada dan berjalan saat ini perlu lebih disempurnakan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana. Penyempurnaan manajemen tersebut berupa dukungan kebijakan dan regulasi, penyempurnaan manajemen teknis serta penyempurnaan data dan informasi. Dengan kegiatan penyempurnaan diharapkan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran produksi tahun 2013 dan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

Sasaran produksi padi tahun 2013 di Kecamatan Tempunak sebesar 87.455 ton GKG, diupayakan dapat dicapai untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Karena itu diperlukan upaya peningkatan produksi yang luar biasa untuk mencapai sasaran tersebut. Berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas telah dilaksanakan melalui SL-PTT sejak tahun 2008 maupun melalui PTT atau peningkatan mutu intensifikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan SL-PTT sebagai pendekatan pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi nasional telah terbukti, namun kedepan

dengan tantangan yang lebih beragam maka perlu penyempurnaan dan peningkatan kualitas.

Implementasi Program SL-PTT di Kabupaten Sintang dalam penetapan lokasi sasaran dan menentukan Kelompok Sasaran adalah dengan kriteria kelompok tani mengajukan proposal ke Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang melalui Kepala Desa dan dengan diketahui Petugas Penyuluh Lapangan, kemudian dari pihak Dinas mempertimbangkan kelayakan dari pengajuan lokasi yang akan diusulkan.

Penetapan Lokasi Desa di Kecamatan Tempunak untuk Program SL-PTT sudah tepat dikarenakan luas lahan kering 99.788 hektar dan sisanya 2.828 hektar adalah lahan sawah, sementara dalam pelaksanaannya di Kecamatan Tempunak untuk Tahun 2013 luas areal SL-PTT adalah lahan sawah 1.550 hektar dan Lahan Kering 250 hektar, dan status lahan yang ada adalah lahan milik pribadi bukan lahan garapan dan masyarakat petaninya juga responsif dengan teknologi serta di Kecamatan Tempunak sendiri bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, banjir dan sengketa.

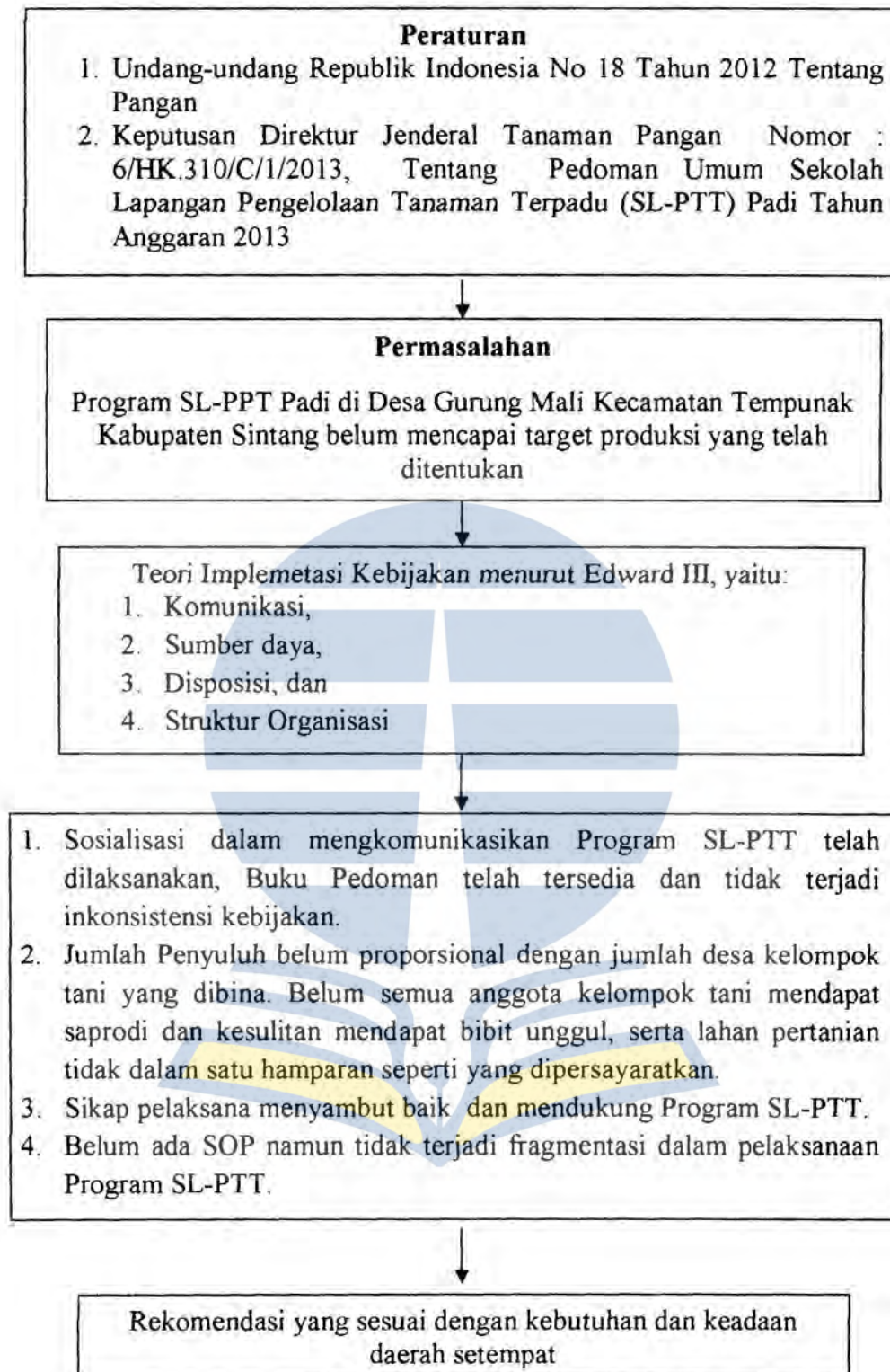
## **B. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini didasarkan pada Program SLPTT berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013, Tentang Pedoman Umum Sekolah Lapangan Pengenalan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Tahun Anggaran 2013. Program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi padi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan

Kabupaten Sintang, namun pelaksanaan program tersebut belum mampu mencapai target yang ditentukan apabila dibandingkan dengan jumlah luas tanaman dan jumlah produksi.

Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana/Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Merujuk pada permasalahan dan teori dalam penelitian ini maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu ini sudah ada yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

- 1) Husnul Hotimah (2011) dengan judul *Dampak Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Dari Aspek Produksi Dan Pendapatan Serta Strategi Pengembangannya*. Penelitian ini bertujuan untuk (a) Untuk mengetahui apakah pendapatan petani dengan pola pendekatan SLPTT menguntungkan; (b) Untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah SLPTT; (c) Untuk mengetahui efisiensi penggunaan biaya produksi pada usahatani padi dengan pola pendekatan SLPTT; (d) Untuk mengetahui perbedaan efisiensi biaya antara sebelum dan sesudah SLPTT; (e) Untuk mengetahui faktor – faktor sosial ekonomi apa saja yang mempengaruhi keberhasilan SLPTT; (f) Untuk mengetahui strategi pengembangan SLPTT selanjutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Program SLPTT berdampak terhadap efisiensinya penggunaan biaya produksi dalam usahatani padi; b) Penggunaan biaya produksi usahatani padi sesudah SLPTT lebih efisien dibanding sebelum SLPTT; c) Program SLPTT berdampak terhadap peningkatan pendapatan usahatani padi; d) Pendapatan usahatani padi sesudah SLPTT lebih menguntungkan dibanding sebelum SLPTT; e) Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap keberhasilan SLPTT adalah umur petani, tingkat kehadiran

petani dalam SLPTT, luas lahan, pendapatan usahatani padi SLPTT, sedangkan pendidikan petani dan biaya variable tidak berpengaruh nyata terhadap keberhasilan SLPTT; f ) Strategi yang dapat dilaksanakan dalam pengembangan SLPTT adalah pelaksanaan SLPTT disesuaikan dengan sosial budaya setempat, merangsang tingkat kehadiran peserta SLPTT, menghidupkan Dinamika Kelompok Tani

- 2) Najmah Faizah (2012) dalam jurnalnya melakukan penelitian dengan judul "*Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Non Hibrida (Studi Kasus Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)*".

Dengan hasil penelitian bahwa Program pemberdayaan masyarakat sangat perlu menggunakan pendekatan partisipatif guna mencapai keberhasilan. Telah banyak strategi pemberdayaan yang mengalami kegagalan yang secara mendasar dikarenakan ketiadaan partisipasi dalam desain pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan melalui program SLPTT padi non hibrida ini adalah adanya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas padi non hibrida yang dihasilkannya. Dalam program SLPTT padi non hibrida ini percobaan teknologi anjuran telah dilakukan di lahan laboratorium lapang seluas 1 ha di masing-masing kelompok. Varietas yang digunakan dalam program SLPTT ini adalah varietas padi cibogo. Seluruh perlakuan yang diberikan pada tiap lahan laboratorium lapang adalah homogeny yaitu mendapatkan pupuk

organik sebanyak 2 ton, pupuk NPK 300 kg, pupuk urea 100 kg, dan pestisida guna mendukung proses produksi padi non hibrida.

Semakin tinggi tingkat partisipasi petani dalam mengikuti program SL-PTT padi non hibrida maka semakin cepat pula terjadinya adopsi teknologi spesifik lokasi di tingkat petani. Dan tentunya terjadi peningkatan produktivitas padi. Akibatnya tingkat kesejahteraan petani dapat meningkat.

**Kesimpulan** dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa Program SL-PTT merupakan program yang baik serta berdampak positif bagi kesejahteraan petani apabila dilaksanakan dan diikuti dengan baik oleh petani, yang ditandai dengan lebih efisiennya biaya produksi padi dan meningkatnya penghasilan petani padi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat perhatian petani dalam SL-PTT sehingga semakin cepat terjadi alih teknologi kepada petani tersebut. Namun kedua penelitian tersebut dilaksanakan dan berhasil cukup baik di Provinsi Jawa Timur, sedangkan implementasi program SL-PTT tersebut tidak berjalan lancar dilaksanakan di Kabupaten Sintang secara khusus di Kecamatan Tempunak.

Persamaan kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan Program SL-PTT dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Sedangkan perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kedua penelitian sebelumnya meneliti efisiensi biaya produksi sebelum dan sesudah melaksanakan Program SL-PTT, peningkatan penghasilan petani yang melaksanakan Program SL-PTT, serta tingkat kehadiran petani dalam SL-PTT sedangkan

pada penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana implementasi Program SL-PTT di Desa Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat ditinjau dari aspek Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi.





## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Penelitian ini secara umum akan menjawab permasalahan tentang Bagaimana Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2013 dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi kebijakan, alokasi sumber daya, sikap pelaksana serta struktur birokrasi. Diharapkan penelitian ini mampu mendeskripsikan serta menganalisis aspek-aspek sebagaimana dimaksud di atas secara mendalam, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, Irawan (2000:60) menyebutkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu seperti apa adanya”. Dengan memakai pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana dan faktor-faktor yang menghambat implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2013.

Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi SL-PTT di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang berdasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Sintang Nomor 08 Tahun 2013, tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial SL-PTT Padi Hibrida Tahun Anggaran 2013.

## **B. Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode *purposive*. Penentuan informan dengan metode *purposive* dimaksud dengan tujuan supaya diperoleh informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan peneliti karena informan yang dipilih tersebut dianggap mengetahui dan memahami permasalahan serta mempunyai data dan informasi yang memadai untuk menjangkau penelitian ini.

Kriteria dalam menentukan informan dalam metode *purposive* ini antara lain adalah:

1. Memahami dan mengetahui peraturan yang menjadi dasar hukum bagi Program SL-PTT di Kabupaten Sintang.
2. Terlibat secara aktif dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Program SL-PTT di Kabupaten Sintang, baik dari pelaksanaan di lapangan maupun secara administrasi
3. Kelompok penerima manfaat atau kelompok sasaran Program SL-PTT yang dalam hal ini adalah kelompok tani.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah

- a. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
- b. Penyuluh Pertanian berjumlah 2 orang dari 8 orang Penyuluh Pertanian Kecamatan Tempunak.

- c. Ketua Kelompok Penerima Kegiatan Sekolah Lapangan Pengenalan Tanaman Terpadu di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang sebanyak 6 orang.

### C. Instrumen Penelitian

Pasolong (2012:164) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif “penelitinya adalah instrumen penelitian (*key instrument*). Jadi yang menjadi instrumen penelitian kualitatif adalah orang yang melakukan penelitian melalui pengamatan (observasi) atau wawancara secara mendalam”. Mengacu pada definisi ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti sendiri adalah instrumen penelitian sebagai kunci dengan melakukan wawancara secara mendalam serta pengamatan langsung terhadap kegiatan subyek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara secara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan subyek penelitian dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi beserta hambatannya dalam implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak.
2. Observasi adalah serangkaian usaha peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dan seksama terhadap

kegiatan subyek penelitian terkait dengan penelitian ini dengan menggunakan daftar ceklis.

3. Studi Dokumentasi, yaitu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan, buku-buku, dan laporan-laporan tertulis yang ada, dan berkaitan erat dengan permasalahan dengan penelitian implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak.

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Sedangkan prosedur dan alat pengumpulan data adalah :

1. Panduan Wawancara  
Berupa susunan pertanyaan yang langsung dinyatakan kepada *informan* yakni dalam bentuk pertanyaan terbuka yang dicantumkan dalam media, hal ini menjadi pedoman dalam melakukan wawancara mendalam.
2. Daftar Pengamatan (*Check List*)  
Daftar ini untuk melengkapi data yang berupa daftar cek terhadap gejala-gejala yang terjadi di dalam implementasi program SL-PTT di Kabupaten Sintang.
3. Alat Dokumentasi  
Alat ini dapat berupa Camera dan foto copy. Alat ini untuk mendokumentasikan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi program SL-PTT di Kabupaten Sintang.

## E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan klasifikasi, interpretasi data dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan sementara, sedangkan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam pola, kategori dan suatu urutan dasar. Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian, dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa analisis data bermaksud mengorganisasikan data. Hal ini disebabkan karena data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari: catatan lapangan, gambar, dokumen dan lain sebagainya. Analisa dalam hal ini mengatur dan mengorganisasikannya.

Analisis kualitatif diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, untuk melengkapi bahan analisa deskriptif. Data primer dianalisis dengan mengembangkan ke teori yang relevan, dan penafsiran hasil analisa deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai. Begitu pula dilakukan, analisis yang sama terhadap data kualitatif yang berasal dari sumber sekunder, tetapi terlebih dahulu dilaksanakan pengujian otentikitas dari data. Analisis kuantitatif meliputi analisis terhadap data hasil pengamatan terhadap gejala sosial.

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti beberapa langkah praktis menurut Irawan (2011), yang menyatakan bahwa dalam mengemukakan beberapa langkah praktis dalam melakukan analisis data

pada penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi data, dan penyimpulan akhir. Berkenaan dengan pendapat ahli tersebut, maka analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) **Pengumpulan data mentah**, pengumpulan data mentah dengan metode wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat seperti *tape recorder*, kamera dan lain-lain di mana penulis hanya mencatat data apa adanya (verbatim). (2) **Transkrip data**, yaitu mengubah catatan ke bentuk tertulis dan diketik persis apa adanya. (3) **Pembuatan koding**, yaitu pembacaan ulang seluruh data yang sudah ditranskrip selanjutnya mengambil “kata kunci”, dan kata kunci tersebut diberi kode. (4) **Kategorisasi data**, yaitu penyederhanaan konsep menjadi kategori-kategori (5) **Penyimpulan sementara**, yaitu mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara. Pada bagian akhir kesimpulan sementara inilah yang disebut *Observers Comments (OC)*. *Observers Comments* adalah pendapat atau reaksi terhadap data di lapangan. (6) **Triangulasi data**, secara sederhana merupakan proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

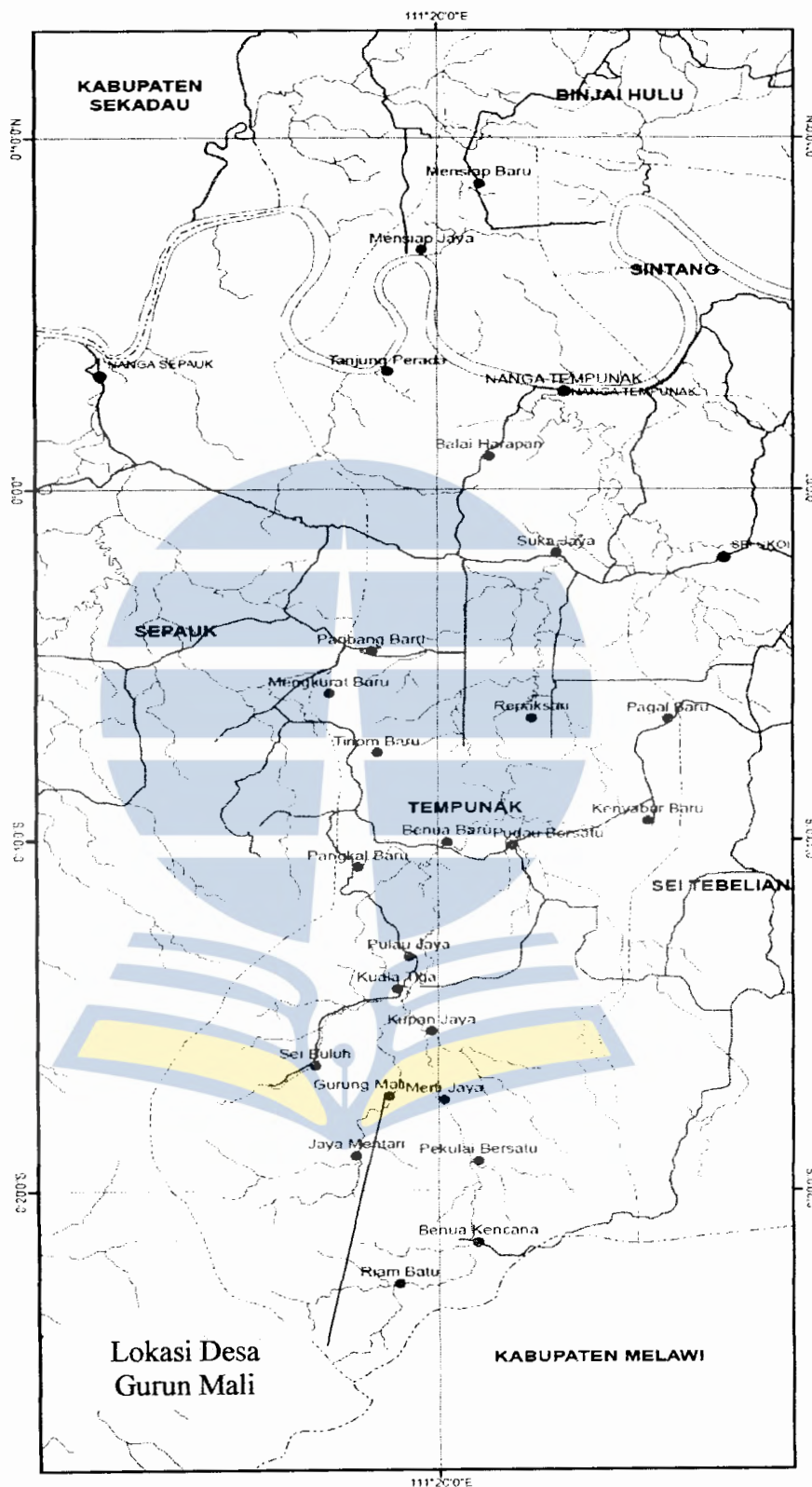
Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Kabupaten Sintang juga merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Luas wilayah yaitu 21.635 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan dimana salah satunya adalah kecamatan Tempunak dengan luas wilayah 1.027 Km<sup>2</sup> yang menjadi sasaran penelitian SL-PTT ini adalah desa Gurung Mali dengan luas wilayah 31 Km<sup>2</sup>.

Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak adalah desa induk/asal yang kemudian dimekarkan menjadi 2 desa baru yaitu desa Sungai Buluh dan Desa Jaya Mentari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No 11 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

Batas wilayah Administrasi Desa Gurung Mali adalah :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kuala Tiga
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jaya Mentari
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Merti Jaya
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Buluh

Gambar 4.1. Peta letak Desa Gurun Mali



Sumber : BAPPEDA Kab. Sintang, 2013



**Tabel 4.1**  
**Luas wilayah per Desa di Kecamatan Tempunak Tahun 2013**

No	Nama Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Benua Kencana	52	5.06
2	Merti Jaya	25.8	2.51
3	Gurung Mali	31	3.02
4	Kuala Tiga	70	6.82
5	Pulau Jaya	43	4.19
6	Pangkal Baru	10	0.97
7	Tinum Baru	53	5.16
8	Benua Baru	42	4.09
9	Kenyabur Baru	24	2.34
10	Pagal Baru	25	2.43
11	Repak Sari	80	7.79
12	Mengkurat Baru	35	3.41
13	Peribang Baru	67	6.52
14	Suka Jaya	50	4.87
15	Balai Harapan	10	0.97
16	Nanga Tempunak	52	5.06
17	Tanjung Perada	33	3.21
18	Mensiap Baru	33	3.21
19	Riam Batu	45	4.38
20	Sungai Buluh	35	3.41
21	Jaya Mentari	28	2.73
22	Kupan Jaya	41	3.99
23	Pudau Bersatu	36	3.51
24	Tempunak Kapuas	41	3.99
25	Pekulai Bersatu	38,4	3.69
26	Mensiap Jaya	27	2.70
<b>JUMLAH</b>		<b>1.027</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kecamatan Tempunak Dalam Angka BPS, Tahun 2014.

Merujuk pada tabel 4.1 di atas, maka dapat dipahami bahwa pada tahun 2012 Luas Kecamatan Tempunak mencapai 1.027 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tempunak terdiri dari 26 Desa, dengan desa terluas adalah Desa Repak Sari dengan luas 7.79 % dari total luas Kecamatan Tempunak. Mengacu pada luas wilayah tersebut maka Kecamatan Tempunak mempunyai potensi untuk dikembangkan di bidang pertanian.

**Tabel 4.2**  
**Luas Lahan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tempunak**  
**Tahun 2013**

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Lahan Pertanian	55.680
	1. Lahan Sawah	2.912
	2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	52.678
	a. Tegal/Kebun	5.500
	b. Ladang	2.508
	c. Perkebunan	40.100
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	2.500
	e. Padang Penggembalaan/rumput	0
	f. Sementara tidak diusahakan	1.160
	g. Lainnya	1.000
2	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Sungai, pemukiman, perkantoran dll)	47.020
<b>JUMLAH</b>		<b>102.700</b>

Sumber : Kecamatan Tempunak Dalam Angka BPS, Tahun 2014

Mengacu pada tabel 4.2 di atas, maka dapat dipahami bahwa potensi perkebunan dan pertanian di Kecamatan Tempunak khususnya di desa Gurung Mali cukup tinggi. Hal ini mengingat kurang lebih 1.160 Ha lahan yang belum diusahakan dan lebih 40.100 Ha sudah diusahakan untuk perkebunan.

## 2. Kependudukan

Faktor Kependudukan sangat berpengaruh dengan pembangunan yang dilakukan, penduduk sebagai tenaga kerja merupakan pelaku sekaligus bahan baku dalam aktivitas pembangunan. Tanpa penduduk dan angkatan kerja yang memadai baik secara jumlah dan kualitas, maka pembangunan sulit dilaksanakan. Adapun data penduduk Kecamatan

Tempunak menurut persentase Keluarga Pertanian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Penduduk menurut Persentase Keluarga Pertanian Kecamatan**  
**Tempunak Tahun 2013**

No	Nama Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Persentase Keluarga Pertanian
1	Benua Kencana	52	988	86.00
2	Merti Jaya	25.8	819	86.00
3	Gurung Mali	31	644	87.00
4	Kuala Tiga	70	1.168	83.00
5	Pulau Jaya	43	1.714	82.00
6	Pangkal Baru	10	1.498	84.00
7	Tinum Baru	53	1.185	82.00
8	Benua Baru	42	878	85.00
9	Kenyabur Baru	24	1.413	82.00
10	Pagal Baru	25	1.232	84.00
11	Repak Sari	80	912	83.00
12	Mengkurat Baru	35	1.060	85.00
13	Peribang Baru	67	1.668	78.00
14	Suka Jaya	50	1.346	74.00
15	Balai Harapan	10	1.103	81.00
16	Nanga Tempunak	52	1.625	83.00
17	Tanjung Perada	33	1.098	86.00
18	Mensiap Baru	33	1.850	80.00
19	Riam Batu	45	878	79.00
20	Sungai Buluh	35	825	84.00
21	Jaya Mentari	28	1.084	84.00
22	Kupan Jaya	41	804	81.00
23	Pudau Bersatu	36	724	83.00
24	Tempunak Kapuas	41	997	84.00
25	Pekulai Bersatu	38,4	380	80.00
26	Mensiap Baru	27	453	86.00
2013		1.027	28.346	82.77
2012		1.027	27.595	81.79

Sumber : Kecamatan Tempunak Dalam Angka BPS, Tahun 2014

Merujuk pada data dalam tabel di atas, tahun 2012 penduduk Kecamatan Tempunak berjumlah 27. 595 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Mensiap Baru jumlah penduduk 1.841 jiwa.

Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Tempunak, maka kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup> terbesar terletak di desa Pangkal Baru yaitu sekitar 147 jiwa dan Kepadatan per Km<sup>2</sup> terendah pada desa Repak Sari yaitu sekitar 11 jiwa, dengan demikian terjadi penyebaran penduduk yang tidak merata di Kecamatan Tempunak dan persentase keluarga pertanian terbesar ada didesa sasaran penelitian yaitu desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak.

### 3. Pertanian

Sektor pertanian terbagi menjadi pertanian pangan dan sub sektor perkebunan yang sering dijadikan menjadi tolak ukur ketahanan pangan dalam suatu daerah. Sektor pertanian merupakan penunjang bagi pemenuhan pangan, pakan dan industri lainnya. Konsumsi pangan terbesar adalah tanaman padi sehingga perhatian penting adalah bagaimana data produktifitas padi yang ada. Adapun data pertanian padi yang ada di Kecamatan Tempunak adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi**  
**Tanaman Padi di kecamatan Tempunak Tahun 2013**

No	Realisasi	Jumlah
1	Luas Panen (ha)	3.928
2	Produktivitas (ku/ha)	33.77
3	Produksi (ton)	12.086

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sintang, Tahun 2013.

Merujuk pada Tabel 4.4 di atas, produksi tanaman padi di Kecamatan Tempunak pada Tahun 2013 sebesar 12.086 Ton yang terdiri dari 9.000 ton padi sawah dan 3.086 Ton Padi Ladang . Rata-rata produksi padi di Kecamatan Tempunak mencapai 33,71 kuintal/ha.

Sedangkan untuk sub sektor perkebunan, pada tahun 2013 di Kecamatan Tempunak masih didominasi oleh Karet dan Kelapa Sawit. Adapun data sub sektor Perkebunan di Kecamatan Tempunak adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Luas Area Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya di Kecamatan Tempunak Tahun 2013**

No	Jenis Tanaman	Petani	Blm. Menghasilkan (Ha)	Menghasilkan (Ha)	Tua/Rusak (Ha)	Jml
1	2	3	4	5	6	7
1	Karet	5.207	3.178	4.504	357	8.039
2	Kelapa Dalam	124	-	38	28	66
3	Kelapa Hibrida	103	-	55	7	62
4	Kepala Sawit	1.483	1.349,74	5.285,71	-	6.635,45
5	Lada	8	-	7	-	7
6	Kopi	93	-	8	22	30
7	Kakao	9	-	-	25	25
8	Kapuk/ Randu	75	8	14		22
9	Aren	93	2	23		25
10	Pinang	95	6	18		24
11	Cengkeh	-	-	-	-	-
12	Tebu	3	-	0,5	-	0,5

Sumber: Kecamatan Tempunak Dalam Angka BPS, Tahun 2014.

Memperhatikan Data pada tabel 4.5 di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sub sektor perkebunan Karet paling banyak menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu 5.207 dengan keseluruhan

jumlah total lahan adalah 8.039 Ha. Sedangkan setelah Karet adalah Kelapa Sawit yang menyerap tenaga kerja mencapai 1.483 orang dengan luas total area perkebunan mencapai 6.635,45 Ha.

Ada beberapa komoditi selain Karet dan Kelapa Sawit cukup mempunyai potensi untuk dikembangkan dan mempunyai pangsa pasar nasional bahkan internasional seperti Lada, Kopi dan Kakao namun belum dikembangkan secara maksimal oleh petani namun ke depannya dapat menjadi perhatian pemerintah dengan melihat peluang dan posisi Kabupaten Sintang yang strategis yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

#### **B. Implementasi Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang**

Dalam rangka ketahanan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka perlu diupayakan peningkatan produksi tanaman pangan dan untuk mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi dan jagung Tahun 2013 difokuskan melalui pendekatan SL-PTT merupakan program strategis nasional dalam mendukung peningkatan produksi dan pemantapan swasembada beras di Indonesia.

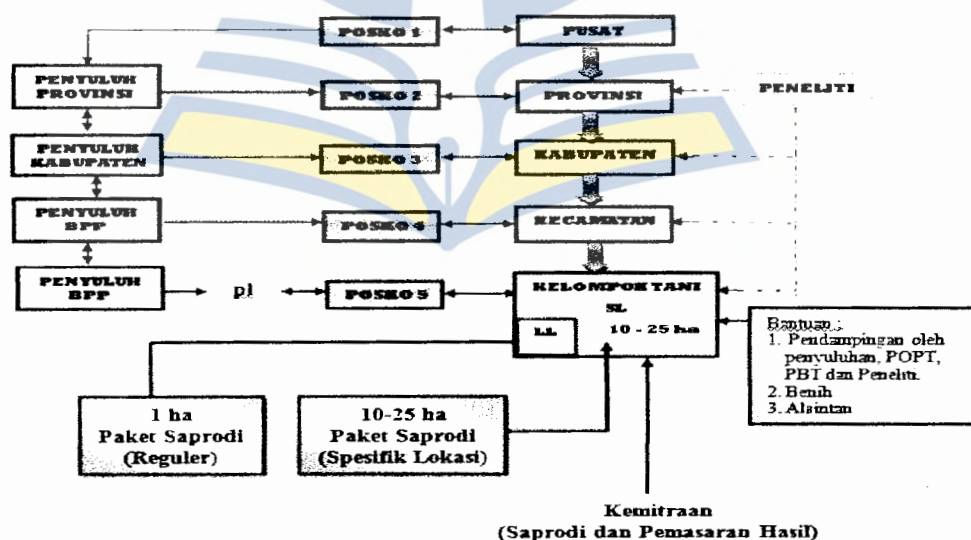
Implementasi Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan apakah program tersebut mampu mencapai hasil dan target yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Impelementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam sebuah siklus kebijakan, karena banyak persoalan yang sebelumnya belum

diakomodir dalam formulasi kebijakan justru muncul pada tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Edward III dalam Teori Implementasi Kebijakan menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi proses implementasi, antara lain adalah (1) *Komunikasi* yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi, (2) *Sumber Daya* yang terdiri dari staf, fasilitas, kewenangan dan informasi, (3) *disposisi*, dan (4) *Struktur Birokrasi* yang terdiri dari Standart Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi

### 1. Komunikasi

Membahas komunikasi maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai bagaimana alur komunikasi dalam sebuah sistem kerja organisasi. Bagan atau alur hirarki birokrasi yang dapat dijadikan standar untuk melihat bagaimana prosedur kerja dalam Program SL-PTT adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2  
Skema Operasional SL-PTT  
(sumber: Buku Pedoman SL-PTT, 2013)

Merujuk skema pada gambar 4.2 di atas, maka posisi Program SL-PTT di tingkat Kabupaten Sintang berada pada Posko 3. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa

sebenarnya, salah satu kunci keberhasilan SL-PTT ini adalah koordinasi yang baik antara tingkat terbawah, yang dalam hal ini kelompok tani, tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat. Kalau mengacu kepada bagan skema pelaksanaan SL-PTT di buku pedoman, kabupaten ada di posisi posko tingkat 3. Di bawahnya ada kecamatan di posko 4 dan tingkat desa ada di posko 5

Berdasarkan hasil wawancara dan bagan skematis operasional SL-PTT di atas tampak bahwa setidaknya ada 5 tingkatan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Setiap tingkatan tersebut masing-masing mempunyai peran dan tugas dalam melaksanakan SL-PTT. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

Kalau di tingkat pusat, penanggungjawabnya adalah Dirjen Tanaman Pangan, pada tingkat Provinsi sebagai penanggungjawa adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan untuk kabupaten, sebagai penanggungjawabnya adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Sedangkan penggungjawa di tingkat kecamatan penanggungjawabnya adalah koordinator penyuluh kecamatan. Nah, sebagai penanggungjawab di tingkat desa adalah masing penyuluh sesuai dengan wilayah desa yang dibinanya

Makna penting dari hasil wawancara di atas adalah tergambaranya siapa saja yang bertanggungjawab pada setiap tingkat dan lini Program SL-PTT. Setelah mendapat gambaran bagaimana lini



implementasi program SL-PTT tersebut, maka perlu dipahami pula apa saja tugas dari setiap lini tersebut, terutama pada tingkat kabupaten sebagai lini yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan SL-PTT pada tingkat kabupaten. Pelaksanaan tugas di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Sosialisasi program kepada petugas dan kelompok tani.
- b. Menyusun petunjuk teknis.
- c. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelompok tani beserta RUK.
- d. Mengusulkan kelompok tani yang memenuhi syarat untuk ditetapkan mendapat bantuan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Melakukan pengawasan pengadaan/penyaluran bantuan.
- f. Pembinaan/bimbingan kepada kelompok tani.
- g. Monitoring dan evaluasi.
- h. Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi.

Bedasarkan peran Tim Pelaksana Tugas Kabupaten tersebut, maka sudah jelas bahwa salah satu peran Tim dimaksud adalah melaksanakan sosialisasi yang dilakukan kepada petugas dan kelompok tani yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks implementasi kebijakan maka komunikasi dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu:

## 1) Transmisi

Transmisi adalah salah satu bagian dari komunikasi dimana pada transmisi ini mementingkan adanya penyaluran atau perpindahan pemahaman dari komunikator (pihak yang menyampaikan pesan) kepada komunikan (pihak penerima pesan). Perpindahan dan penyaluran komunikasi dari komunikan ke komunikator yang baik akan menghasilkan suatu persamaan persepsi antara pembuat kebijakan dan implementor di lapangan sehingga proses implementasi akan berlangsung baik pula. Namun demikian sering pula terjadi salah komunikasi atau salah pengertian yang menyebabkan apa yang disampaikan oleh pembuat kebijakan ditafsirkan dan dilaksanakan secara berbeda oleh implementor di lapangan yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terdistorsinya esensi dan substansi kebijakan tersebut di tengah proses implementasi.

Melalui transmisi ini diharapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak menyadari bahwa Program SL-PTT telah keluar, disahkan dan harus dilaksanakan sehingga bentuk yang transmisi yang paling sering digunakan adalah sosialisasi. Sebelum sosialisasi dilakukan kepada masyarakat sasaran maka implementor harus mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terhadap program SL-PTT.

Selain pejabat dinas terkait, keberhasilan transmisi ini sangat ditentukan oleh para pelaksana yang mendampingi para penerima

bantuan SL-PTT di lapangan. Para pendamping tersebut ada Petugas Penyuluh Lapangan yang terjun langsung melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada masyarakat, sehingga para Penyuluh tersebut harus sangat memahami dan terlatih dalam melaksanakan SL-PTT.

Berkenaan dengan hal tersebut, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “para penyuluhlah yang melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hingga ke masyarakat di desa, mulai dari apa saja kegiatan SL-PTT ini, bagaimana melaksanakannya, sampai cara menanam hingga panen padi masih didampingi”. Lebih lanjut Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa:

Salah satu upaya kita menerapkan program Sekolah Lapangan Pengenalan Tanaman Terpadu (SL-PTT) kepada petani agar sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku adalah dengan melakukan komunikasi dan pembinaan dilapangan’, Kami melakukan sosialisasi dan pembinaan di lapangan dengan cara kunjungan ke lapangan yaitu ke kelompok taninya mengajak petani untuk menentukan kapan penggarapan lahan dapat dimulai, penyemaian dan penanaman. Setelah itu baru kami bersama-sama musyawarah di tingkat desa kapan kiranya atau menyesuaikan waktu tetapi tidak boleh lewat dari musim tanam untuk melakukan penanaman padi secara bersama-sama dan tentunya kami menyampaikan bahwa kegiatan ini bersifat bantuan dari Pemerintah yang harus dikerjakan dengan baik karena hasilnya adalah untuk petani itu sendiri dalam rangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani itu sendiri. (wawancara pada tanggal 7 Mei 2014).

Purwanto (2012) menyatakan bahwa pada hakekatnya kegiatan penyampaian informasi biasa disebut sosialisasi dimana dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung melalui ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif lewat radio/tv/internet. Sedangkan secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda

depan (*street-level bureaucrats*) dalam mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan sasaran secara tatap muka tetapi melalui papan pengumuman, pamflet, leaflet, spanduk, brosur, buku saku, iklan layanan masyarakat lewat TV, radio, surat kabar, dan website.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “kalau bentuk komunikasi yang kita lakukan dalam SLPTT adalah sosialisasi tatap muka dan pakai pamflet. Kita tatap muka karena skop penerima bantuan kan di tingkat desa saja dan bisa ditangani oleh satu penyuluh sekaligus” (Wawancara pada tanggal 6 Mei 2014).

Lebih lanjut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang mengatakan bahwa

Tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan SL-PTT ini adalah dengan melakukan Sosialisasi. Pertama-tama dimulai Sosialisasi Program kepada Petugas dan Kelompok Tani. Menyusun Petunjuk Teknis, Melakukan seleksi dan Verifikasi terhadap kelompok tani beserta Rencana Umum Kelompok, kemudian Tim melakukan atau mengusulkan kepada saya kelompok tani yang memenuhi syarat untuk ditetapkan, kemudian melakukan pengawasan penyaluran bantuan, melakukan pembinaan kepada kelompok tani, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi. Ini merupakan tahapan-tahapan yang perlu di komunikasikan dengan baik kepada petugas pelaksana maupun masyarakat petani atau kelompok tani.

Berkenaan dengan pelaksanaan sosialisasi, Ketua Kelompok Riam Bersi Bersatu Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “sosialisasi

sudah pernah dilakukan oleh Dinas, dari penyuluh juga ada, kami setiap bulan ada latihan-latihan oleh pak penyuluh” (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014). Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Lebak Sankim Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “sosialisasi sudah pernah dulu, orang dari dinas dan pak penyuluh juga membimbing petani” (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014).

Lebih lanjut, Penyuluh Pertanian Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “SL-PTT di Kabupaten Sintang ini sudah ada sejak tahun 2008 sampai sekarang, setiap tahun Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang selalu melaksanakan sosialisasi terutama kepada kelompok yang baru menerima program ini”. Mengacu pada hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa SL-PTT di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan dari tahun 2008 dan komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tatap muka langsung dengan menggunakan beberapa media cetak berupa pamflet.

Tatap muka langsung merupakan bentuk sosialisasi yang sangat efektif karena implementor dapat secara langsung menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan program SL-PTT dan masyarakat dapat bertanya jawab langsung dengan narasumber. Sedangkan penggunaan media cetak bertujuan untuk menjangkau kelompok sasaran yang luas serta tidak dimungkinkan untuk berkumpul bersama dan bertatap muka dengan narasumber secara langsung.



**Gambar 4.3**  
**Sosialisasi SL-PTT**

Selain kedua cara sosialisasi tersebut di atas, untuk memudahkan masyarakat atau peserta SL-PTT ini dalam memahami isi program diperlukan media yang mampu mengilustrasikan sisi positif kebijakan melalui media elektronik, dengan menyajikan berbagai informasi dalam bentuk film pendek dan ceramah. Berkenaan dengan hal tersebut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa

kalau untuk penggunaan media elektronik dalam SL-PTT ini masih cukup sulit untuk dilakukan karena akses listrik di desa-desa di Kecamatan Tempunak masih sulit. Sebenarnya penggunaan media elektronik seperti TV sangat baik karena dengan melihat ilustrasi secara visual yang sudah dikemas dengan baik dan seksama akan sangat memudahkan peserta program SL-PTT dalam menangkap informasi yang ada.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Kita Bersatu yang menyatakan bahwa “selama ini pertemuan-pertemuan

dengan PPL langsung berkumpul dan tatap muka di lapangan, kalau untuk sosialisasi SL-PTT menggunakan TV belum pernah karena susah listrik apa lagi jika kumpulnya di ladang, listrik hanya nyala malam pakai genset”. Dari kedua hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk sosialisasi menggunakan media televisi masih belum memungkinkan mengingat tingkat elektrifikasi di Desa Gurung Mali masih relatif rendah dan listrik hanya menyala malam hari menggunakan generator set. Berangkat dari hal tersebut perlu dirancang sebuah mekanisme bagaimana dalam suatu penyuluhan pertanian untuk menggunakan media televisi atau media elektronik lainnya, mengingat bahwa dengan melihat gambar dan suara masyarakat dapat memahami substansi program lebih baik.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dari jarak jauh tidak menjadi hambatan berarti terutama dengan pemanfaatan media internet. Dengan ketersediaan jaringan internet dan sarana pendukung lainnya memungkinkan untuk implemendor dan kelompok sasaran untuk berkomunikasi dan berinteraktif. Berkenaan dengan penggunaan media internet untuk komunikasi secara interaktif, Penyuluh Pertanian Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “seandainya dalam pelaksanaan program SL-PTT ini kami sudah didukung oleh peralatan dan jaringan internet yang memadai dan sumber daya petani yang mampu mengoperasikan perangkat internet maka peluang program ini berhasil seperti yang diharapkan akan semakin besar”.

Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Desa Mertijaya Kecamatan Tempunak yang menyatakan bahwa “untuk penggunaan internet dalam SL-PTT masih sangat jarang, hal tersebut dikarenakan oleh sulitnya jaringan internet dan jaringan untuk telpon seluler. Jangankan untuk interaktif, untuk mencari informasi yang berkenaan dengan pertanian dan bertukar informasi dengan petani di daerah lain saja masih sangat sulit. Padahal sebenarnya dengan internet peluang kita untuk mendapatkan dan bertukar ilmu dengan orang lain di lain daerah yang juga ikut SL-PTT ini juga sangat besar”. Sementara menurut Ketua Kelompok Tani Bariyau menyatakan bahwa “kalau untuk menggunakan internet belum bisa, sinyal untuk handphone saja masih sulit”

Merujuk pada hasil wawancara di atas, berkenaan dengan pemanfaatan media internet masih sangat rendah dikarenakan belum ada fasilitas dan akses jaringan yang masih sangat terbatas. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa petani di Desa Gurung Mali masih tradisional dan belum memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pertaniannya.

## 2) Kejelasan

Apabila aspek transmisi telah dilakukan, aspek lainnya yang turut menentukan dalam komunikasi kebijakan adalah aspek kejelasan bagaimana kebijakan akan dilaksanakan. Aspek kejelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang akan diimplementasikan akan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan



dan memastikan bahwa komunikasi Komunikasi yang diterima oleh implementor kebijakan harus jelas dan tidak dan mempunyai arti yang ambigu dan dapat diartikan secara berbeda.

Untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan berjalan sebagaimana mestinya maka perlu adanya petunjuk-petunjuk bagaimana kebijakan harus dilaksanakan berupa buku panduan sebagai acuan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan.

Berkenaan dengan ketersediaan Juklak dan Juknis dimaksud, Salah satu tugas Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Sintang mempunyai tugas yang salah satunya untuk menyusun Petunjuk Teknis. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa

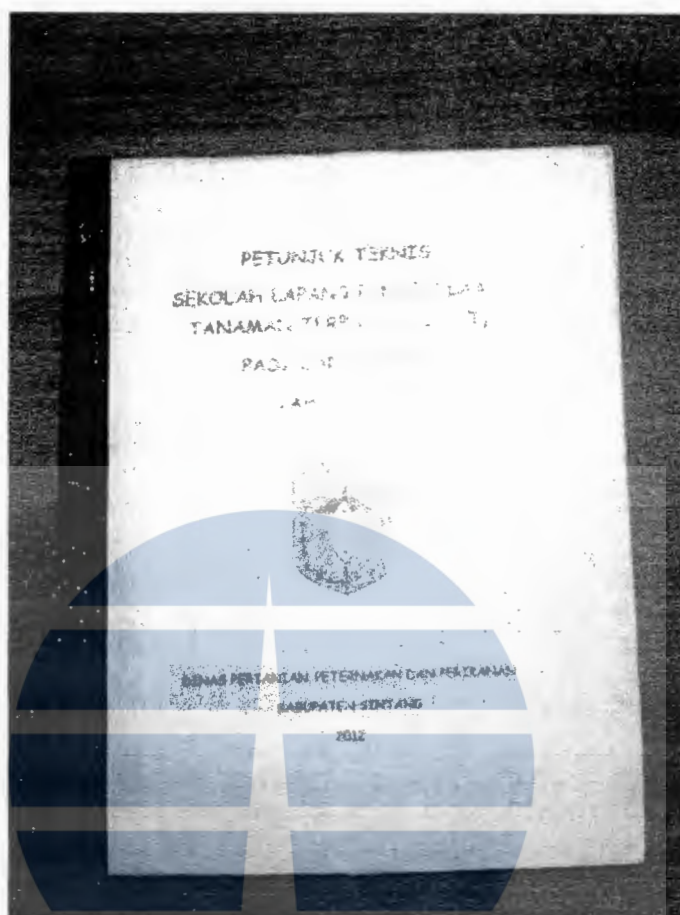
jadi begini, secara umum, buku petunjuk sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan SL-PPT ini sudah ada dan itu sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013 tentang Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengenalan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2013. Untuk menjabarkan peraturan atau juknis dari pusat tersebut, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang juga menyusun juknis sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sintang ini

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “Buku Pedomannya itu sudah ada, dan itu wajib jadi pegangan kami, di dalamnya sudah jelas semua latar belakang program sampai teknisnya”. Merujuk pada hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa paling tidak Juknis dan Juklak pelaksanaan program SL-PTT sudah ada pada tingkat Dinas dan

penyuluh lapangan Desa Gurung Mali. Selain itu, buku petunjuk yang dipedomani tersebut juga perlu dimiliki dan menjadi pegangan petani di lapangan. Berkenaan dengan tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “Buku Pedoman sudah disampaikan juga kepada petani dengan harapan mereka bisa mempelajarinya sehingga mereka mengerti tujuan dan bagaimana melaksanakan SL-PTT ini. Kalau mereka sudah paham tujuan kegiatan ini dan memang sejalan dengan tujuan mereka pastilah kegiatan ini akan lancar”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Lapangan Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “Buku Petunjuk Teknis SL-PTT tersebut sudah disampaikan ke Kelompok Tani, itu harus menjadi rujukan untuk seluruh petani termasuk juga penyuluhnya”. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Kelompok Tani “Buku Pedomannya sudah ada, setiap tahun selalu dapat dari Dinas dibawa sama bapak Penyuluh”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang, Penyuluh Lapangan Desa Gurung Mali dan Kelompok Petani sudah memahami bahwa Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT sangat penting dan harus dimiliki serta dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan Program SL-PTT. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT telah dimiliki dan secara nyata ada sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar 4.4**

**Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT Tahun 2012**

**Sumber : Hasil Observasi, 2014**

Selain ketersediaan buku pedoman, hal yang juga penting adalah pelatihan terhadap Penyuluh berkenaan dengan bagaimana menggunakan buku pedoman tersebut. Meskipun buku pedoman sudah dibuat dan dipegang oleh penyuluh, diperlukan juga persamaan penafsiran dan persepsi terhadap pelaksanaan yang dimuat dalam buku dimaksud dan apa yang akan disampaikan kepada petani di lapangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman

Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

seluruh PPL di lapangan sudah dilatih dan dikumpulkan terkait SLPTT. Para PPL sudah dikumpulkan dan membahas bersama buku pedoman ini dan seperti apa aksi di lapangan nantinya. Dinas berusaha meminimalisir agar program ini tidak bias di lapangan dan jangan sampai apa yang ada di Buku Pedoman mensyaratkan A tetapi di lapangan nanti jadi B.

Merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa

sebelum ke lapangan, setiap tahunnya Penyuluh-Penyuluh selalu disosialisasikan dan membahas bersama buku juknis yang diturunkan dari pusat dan pedoman yang dibuat oleh Dinas Kabupaten. Hal tersebut penting karena biasanya ada perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan setiap tahunnya sehingga pembahasan buku petunjuk sangat perlu sebelum turun ke lapangan.

Dari beberapa hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa buku pedoman sudah ada dan dibagikan ke setiap pelaksana Program SLPTT dan sudah dibahas oleh penyuluh sebelum ke lapangan. Setelah Buku Pedoman tersebut dibahas bersama penyuluh, maka selanjutnya penyuluh akan menyampaikan buku pedoman tersebut kepada Kelompok Tani di wilayah desa binaannya masing-masing. Menurut Ketua Kelompok Bariyau “buku petunjuknya sudah pernah diberikan kepada kami, biasanya sih kalau awal mau mulai kegiatan ada kumpul dulu dengan pak penyuluh sambil menerangkan buku petunjuk”. Hasil wawancara tersebut juga sejalan dengan hasil observasi sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4. 6**  
**Ketersediaan Petunjuk Teknis atau Buku Pedoman SL-PTT di**  
**Desa Gurung Mali**

No	Nama Kelompok Tani	Petunjuk Teknis atau Buku Pedoman SL-PTT	
		Ada	Tidak Ada
1	RIAM BERSI BERSATU	✓	
2	LEBAK SANKIM	✓	
3	HARAPAN MAJU	✓	
4	KITA BERSATU	✓	
5	PANGKAL MARSELUNG	✓	
6	BARIYAU	✓	

Sumber: Hasil Observasi, 2014

Dari hasil observasi yang dilakukan tampak bahwa setiap kelompok sudah mempunyai buku petunjuk SL-PTT meskipun masih Buku Pedoman Tahun 2012. Dengan adanya buku tersebut setidaknya aspek kejelasan dalam program SL-PTT ini tidak mempunyai hambatan berarti.

### 3) Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan juga sangat berpengaruh pada keefektifan implementasi sebuah kebijakan. Pertentangan antara perintah, petunjuk, dan peraturan merupakan sesuatu yang semestinya dihindari. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah maka akan menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan kebijakan.

Berkenaan dengan konsistensi, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “sejauh ini tidak ada peraturan yang bertentangan antara peraturan yang menyangkut SL-PTT ini. Dalam Program ini kami hanya merujuk pada buku Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013 tentang Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2013”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam hal konsistensi tidak ada pertentangan dalam peraturan maupun petunjuk dalam Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di Kabupaten Sintang.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan aset suatu organisasi dalam mencapai tujuan karena tanpa sumber daya yang memadai baik berupa manusia maupun non manusia organisasi tidak akan jalan. Namun demikian, walaupun suatu organisasi mempunyai sumber daya yang berlimpah belum tentu organisasi tersebut mampu mencapai tujuannya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlu pengaturan atau pengorganisasian yang baik dengan prinsip manajemen yang baik pula. Winarno (2012:179) menyatakan sumber daya yang penting dalam implementasikan kebijakan adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

### a. Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Staf merupakan aktor utama sebagai implementor kebijakan di lapangan. Tanpa ketersediaan staf baik dari segi kuantitas dan kualitas, maka dapat menghambat implementasi Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “kalau berbicara masalah kualitas penyuluh dalam mendampingi petani, kami sama sekali tidak ragu. Nah kalau sudah berbicara soal jumlah penyuluh yang proporsional dengan jumlah kelompok tani sekarang itu masih jauh dari sesuai”. Penyampaian sebagaimana hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa secara kualitas Dinas Pertanian Sintang merasa bahwa kualitas Penyuluh Pertanian Lapangan sudah memadai, namun dari kuantitas masih belum proporsional untuk dapat mendampingi petani secara intensif.

Berangkat dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan adalah garda terdepan dalam kegiatan Program SL-PTT. Penjelasan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/permentan/ot.140/1/2008 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menyatakan bahwa Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup

Lebih lanjut, peraturan tersebut membagi lagi Penyuluh menjadi Penyuluh PNS dan Penyuluh THL Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian. Sedangkan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Departemen Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Data penyuluh dalam mendampingi petani dalam Program SL-PPT di Kecamatan Tempunak adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.7**  
**Penetapan Petugas Penyuluh Lapangan untuk Program Sekolah**  
**Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)**  
**Kecamatan Tempunak Tahun 2013**

No	Nama Desa	Nama PPL
1	Mensiap Baru	Suharno
2	Gurung Mali	Suharjo
3	Sungai Buluh	Suharjo
4	Mengkurat Baru	F. Marni
5	Paribang Baru	F. Marni
6	Suka Jaya	Elianus Emi
7	Repak Sari	Elianus Emi
8	Mertijaya	Marsiana
9	Tinom Baru	Yatino
10	Pangkal baru	Yatino
11	Benua Kencana	Mudiyana, S.ST
12	Riam Batu	Mudiyana, S.ST
13	Jaya Mentari	Solehan, SP
14	Kuala Tiga	Solehan, SP

Sumber : Badan Penyuluh Pertanian Peternakan Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kab Sintang, Tahun 2013.

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa jumlah Penyuluh Pertanian Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak berjumlah 8 orang, dengan jumlah desa binaan berjumlah 14 desa. Dari data tersebut maka dapat dipahami bahwa perbandingan jumlah Penyuluh dengan jumlah desa yang menerima Program SL-PTT sangat belum proporsional. Penyuluh yang memegang desa binaan paling banyak adalah Penyuluh Desa Gurung Mali, dan Sungai Buluh. Sementara menurut petunjuk teknis, untuk satu desa adalah dibina oleh satu penyuluh.

Pendampingan dan pengawalan oleh Petugas Penyuluh Lapangan dilakukan pula pada seluruh areal tanam maupun panen baik SL-PTT maupun pertanaman Reguler (Non SL-PTT) melalui Gerakan Pengembangan Kawasan Padi dan harus lebih aktif guna

melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk turun ke lapangan memantau kondisi di lapangan, menggerakkan percepatan tanam/panen serentak, pemeliharaan tanaman dan mengetahui segala permasalahannya untuk selanjutnya diselesaikan.

Berdasarkan Buku Pedoman SL-PTT, Pendampingan kegiatan SL-PTT oleh Pemandu Lapangan khususnya Penyuluh Lapangan, mempunyai tugas sebagai :

- 1) Pemandu yang paham terhadap permasalahan, kebutuhan dan kekuatan yang ada di lapangan dan desa
- 2) Dinamisator proses latihan SL-PTT sehingga menimbulkan ketertarikan dan lebih menghidupkan latihan
- 3) Motivator yang kaya akan pengalaman dalam berolah tanam dan dapat membantu membangkitkan kepercayaan diri para peserta SL-PTT
- 4) Konsultan bagi petani peserta SL-PTT untuk mempermudah menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan usahatannya setelah kegiatan SL-PTT selesai.

Apabila dikorelasikan antara jumlah penyuluh dan jumlah petani yang harus dibina, maka intensitas pembinaan yang dapat dilaksanakan oleh penyuluh sangat berat dan kecil intensitas pembinaan untuk setiap kelompok taninya. Adapun data penerima Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Program Sekolah**  
**Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kecamatan**  
**Tempunak Tahun 2013**

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok	Desa
1	Cahaya Baru	Sadmin	24	Mensiap Baru
2	Usaha Maju	Susanto	24	Mensiap Baru
3	Mardi Tani	Sayit	24	Mensiap Baru
4	Jaimatud O'a	Yulianto	24	Mensiap Baru
5	Rahayu	Mulyono	24	Mensiap Baru
6	Harapan Maju	Suparmo	24	Mensiap Baru
7	Riam Bersi Bersatu	Tamari	24	Gurung Mali
8	Lebak Sankim	Julung	25	Gurung Mali
9	Harapan Maju	S. Ujang Sutoyo	25	Gurung Mali
10	Kita Bersatu	Sumindra	25	Gurung Mali
11	Pangkal Marselung	Agustinus	25	Gurung Mali
12	Bariyau	Heranus	25	Gurung Mali
13	Sinar Jaya	Manien	24	Sungai Buluh
14	Bina Jaya	Akiong	24	Sungai Buluh
15	Meruas Jaya	Sian udau	24	Sungai Buluh
16	Bubut Lestari	Jaker	25	Sungai Buluh
17	Bubut Lestari	y. unat	25	Sungai Buluh
18	Pemuda Mandiri	Kait	24	Sungai Buluh
19	Karya Bakti	Lahuri	24	Mengkurat Baru
20	Mekar Sari	Boiran	24	Mengkurat Baru
21	Karya Makmur	Nyadi	24	Mengkurat Baru
22	Sadar	Rohani Harjo	24	Paribang Baru
23	Karya Bhakti	Wiharna	24	Paribang Baru
24	Sumber Mulya	Ayong	24	Paribang Baru
25	Ingin Maju	Damianus K	24	Paribang Baru
26	Setia Bakti	Hendro	23	Paribang Baru
27	Tani Maju	Asih Muja S.	23	Paribang Baru
28	Maju Sarana	Sugeng	24	Paribang Baru
29	Jaya Tani	Immanuel oja	24	Suka Jaya
30	Sekar Harum	Sutrisno	24	Repak Sari
31	Tunas Harapan	Kirso	24	Repak Sari
32	Sumber Harapan	Awat	24	Mertijaya
33	Penyak Bersatu	Nasori	24	Mertijaya
34	Sumber Rejeki	Ali	24	Mertijaya
35	Sumber Hidup	Atin	24	Mertijaya
36	Usaha Bersama	Tobing	24	Mertijaya
37	Sumber Usaha	Pasemanto	24	Mertijaya
38	Mekar Tani	Marta	24	Mertijaya
39	Sido Makmur	Juari	24	Tinom Baru

40	Karya Tani	Martubi	24	Tinom Baru
41	Cita Makmur	Saiman	24	Tinom Baru
42	Tani Mandiri	Musdarmanto	24	Tinom Baru
43	Sumber Rejeki	Basori	24	Tinom Baru
44	Sumber Rejeki	Sumarto sujak	24	Pangkal baru
45	Makmur	Nurudin	24	Pangkal baru
46	Makarti	Sutoyo	24	Pangkal baru
47	Bunga Mawar	Suradi	24	Pangkal baru
48	Tunas Mekar	Anas	24	Pangkal baru
49	Tunas Jaya	Agustinus anis	24	Benua Kencana
50	Sinar Pagi	Idris	24	Benua Kencana
51	Sungai Jungkang	Moses wendi	24	Benua Kencana
52	Usaha Mandiri	Denis	24	Riam Batu
53	Singa Saran Bersatu	Entail	24	Riam Batu
54	Mampuh Merap	Matius	24	Jaya Mentari
55	Rawa Bening	Siprianus jais	24	Jaya Mentari
56	Harapan Jaya	Andi	24	Jaya Mentari
57	Usaha Bersama	s. lawas	24	Jaya Mentari
58	Dara Muda	Fadli khalik	24	Kuala Tiga
59	Jaya Utama	Sugeng	24	Kuala Tiga
60	Gogo	Sukijan	24	Kuala Tiga
61	Suka Maju I	Hartono	24	Kuala Tiga
62	Suka Maju II	Ya' edi marjuki	24	Kuala Tiga
63	Usaha Kita	Musa hasbullah	24	Kuala Tiga

Sumber : Surat Keputusan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Sintang, Tahun 2013

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa ada 63 kelompok penerima Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak pada Tahun 2013. Apabila dibandingkan dengan jumlah penyuluh yang berjumlah 8 orang dengan Kelompok Tani binaan maka setiap Penyuluh Lapangan harus membina 7 hingga 8 Kelompok Tani. Berkenaan dengan jumlah penyuluh dan petani yang menjadi binaannya, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa

Pembinaan selama ini telah dilakukan secara terus menerus, baik di lokasi SL-PTT maupun di Luar Lokasi SL-PTT dan memang kami merasa kekurangan jumlah dari Penyuluh, dan karena luasnya lokasi kegiatan kadang-kadang waktu kami memang terbatas untuk melakukan pembinaan, tapi

Alhamdulillah waktu pertemuan atau kunjungan kami ke lapangan petaninya banyak bertanya untuk hal-hal yang mereka tidak tahu.

Berkenanan dengan perbandingan jumlah Penyuluh Lapangan dengan jumlah Kelompok Tani binaannya, Penyuluh Pertanian Desa Mertijaya menyatakan bahwa:

perbandingan jumlah penyuluh yang ada dengan jumlah kelompok petani yang harus dibina dalam Program SL-PTT menimbulkan tantangan tersendiri bagi para penyuluh. Disatu pihak tugas dan kewajiban untuk melakukan pendampingan, motivasi, dan konsultasi harus dijalankan namun di lain pihak keterbatasan tenaga yang selalu bisa berada di desa sangat terbatas. Memang idealnya setiap desa ada Penyuluh yang berada di satu desa

Merujuk pada hasil wawancara tersebut di atas Ketua Kelompok Pangkal Marselung Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “selama ini Petugas yang melakukan sosialisasi dan pembinaan, kemampuan dan komunikasinya sudah cukup baik, dan mereka mengunjungi kami tetapi kalo bisa petugas Penyuluh Lapangannya ditambah personilnya bu” (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014). Dari pernyataan tersebut tampak bahwa petani memerlukan pendampingan yang lebih intensif dalam melakukan penanaman padi sehingga diperlukan tambahan tenaga penyuluh.

Selain ketersediaan jumlah penyuluh yang profesional terhadap jumlah desa dan kelompok yang dibinanya. Kualitas penyuluh dalam hal keterampilan mendampingi petani sangat menentukan. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh pertanian dapat dilakukan melalui melanjutkan pendidikan formal, melalui

pendidikan dan pelatihan dan seminar-seminar. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

Pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyuluh sudah dilakukan. Pelatihan tersebut dilakukan secara berturut-turut sejak tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Kenapa tahun 2013 yang lalu tidak ada pelatihan? Karena pada dasarnya secara kemampuan dan keterampilan dalam ilmu pertanian dan bercocok tanam sangat baik. Hanya saja yang perlu penyesuaian adalah jika ada perubahan-perubahan aturan dan kebijakan pertanian dalam program SL-PTT ini. Tahun 2013 lalu, hampir tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Sehingga pelatihan tidak dilakukan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pelatihan bagi para penyulu pertanian sudah dilakukan selama 4 tahun secara berturut-turut dan sebagai hasilnya adalah bahwa kualitas penyuluh meningkat dan dipandang siap untuk melakukan pendampingan terhadap petani yang ada di wilayah desa binaannya. Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “pelatihan sudah dilakukan kepada seluruh penyuluh. Penyuluh pertanian dituntut untuk dapat maksimal dalam membimbing petani terutama dengan teknologi pertanian yang relatif masih baru bagi mereka”.

Dari pernyataan di atas tampak bahwa ada upaya dari Program SL-PTT ini untuk mendorong kelompok petani untuk terus menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka.

## b. Fasilitas

Selain sumber daya manusia berupa ketersediaan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitas, aspek penting dalam implementasi SL-PTT di Kecamatan Tempunak adalah fasilitas dalam mendukung pekerjaan baik berupa sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dipandang sangat penting mengingat bahwa sumber daya manusia yang memadai tanpa didukung dengan sarana dan prasarana tidak akan maksimal dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Adapun prasarana yang dimaksud adalah fasilitas keuangan, sarana produksi pertanian (saprodi), dan sebagainya.

Sarana produksi dalam pertanian merupakan fasilitas yang sangat penting dalam usaha pertanian. Suratiyah (2008) dalam <http://bilongtuyu.blogspot.com/2014/01/sarana-produksi-pada-sektor-pertanian.html> yang menyatakan bahwa Saprodi:

terdiri dari alat-alat pertanian, pupuk dan pestisida, di mana alat-alat pertanian untuk mengelolah lahan dan tanaman digunakan alat-alat seperti cangkul, parang babat, arit dan traktor. Dengan sistem pengolahan lahan dengan baik dan benar akan memperoleh hasil yang lebih bagus. Pupuk juga sangat diperlukan juga untuk pertumbuhan tanaman karena akan membantu proses pertumbuhan tanaman, dengan pemberian pupuk sesuai dengan dosis yang di berikan akan membuat tanaman lebih subur lagi. Pestisida digunakan untuk membasmi hama dan penyakit, dengan menggunakan pestisida yang berlebihan maka akan membuat tanaman mati dan hama tanaman menjadi resisten/tahan akan kekebalan tubuhnya.

Berkaitan dengan bantuan yang diperlukan dan diperoleh oleh Kelompok Tani, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan menyatakan bahwa

Bantuan kepada petani dalam suatu kelompok tani adalah dalam bentuk bantuan sosial dengan pola bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam bentuk bantuan dana untuk pembelian pupuk urea, NPK, Pupuk Organik atau dolomite/kapur putih untuk Laboratorium Lapangan (LL) seluas 1 hektar pada setiap unit SL-PTT serta ada diberikan biaya pertemuan, insentif pendamping, dan papan nama sesuai alokasi untuk kegiatan SL-PTT yang diberikan dengan cara ditransfer ke rekening kelompok tani. Dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang juga ada memberikan bantuan Alsintan dan lain-lain

Merujuk pada wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola bantuan yang diterima masyarakat dalam SL-PTT ini adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari penyediaan Pupuk Kimia dan Pupuk Organik yang dikhususkan untuk areal Laboratorium Lapangan saja yang berjumlah 1 hektar saja dalam satu kelompok. Berikut adalah bantuan pupuk yang disalurkan kepada Kelompok Tani:



Sumber: Observasi dan dokumentasi, 2013.

**Gambar 4.5**  
**Bantuan Pupuk Bagi Areal LL**



Selain itu, fasilitas keuangan dari pusat juga mengakomodir biaya pertemuan antara Penyuluh dan Kelompok Tani, dan insentif pendampingan. Sementara dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang memberikan bantuan Saprodi.

Mengingat bahwa pentingnya ketersediaan Saprodi, maka saprodi merupakan fasilitas yang harus ada dan memadai dalam SL-PTT. Berkenaan dengan hal tersebut Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “sampai saat ini yang dapat bantuan saprodi hanya 1 hektar yang menjadi Laboratorium Lapangan saja”. Senada dengan tersebut Ketua Kelompok Petani Bariyau Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “yang dapat saprodi hanya untuk LL saja. Untuk para petani anggota harus mengusahakan saprodi masing-masing, areal LL hanya untuk percontohan mereka saja” (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014). Mengacu pada hasil wawancara tersebut, maka yang mendapatkan bantuan saprodi hanya areal percontohan yaitu Laboratorium Lapangan (LL) saja.

Ketua Kelompok Tani Harapan Maju Desa Gurung Mali mengatakan bahwa “sebenarnya kami memerlukan saprodi yang memadai untuk menggarap lahan kami. Namun yang mendapat hanya areal LL saja” (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014). Dari wawancara tersebut, sebenarnya para petani anggota kelompok yang di luar LL juga membutuhkan saprodi dalam mengolah lahannya.



Sumber: Observasi dan dokumentasi, 2013

#### Gambar 4.6 Bantuan Pestisida Areal LL

Selain saprodi, ketersediaan benih unggul yang memadai juga harus menunjang pelaksanaan SL-PTT di Kecamatan Tempunak. Benih varietas unggul sangat diperlukan untuk menghasilkan tanaman yang unggul sehingga dapat meningkatkan produksi padi SL-PTT. Berkenaan dengan hal tersebut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “bantuan benih unggul selalu ada untuk para petani SL-PTT, namun benih unggul itu masih didatangkan dari luar Kalimantan. Sampai saat ini kita masih mengandalkan pasokan dari Jawa”.

Berkenaan dengan ketersediaan benih, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “untuk urusan benih kita masih mengandalkan distribusi dari Luar Sintang karena penangkar benih belum mampu menyediakan sesuai kebutuhan petani di Sintang ini. Akibatnya pasokan benih tersebut sering terlambat dan itu sudah menjadi masalah secara nasional”. Berdasarkan hasil wawancara di

atas, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya ketersediaan benih untuk SL-PTT di Kecamatan Tempunak masih mengandalkan suplai benih dari luar Kabupaten Sintang dan hal tersebut mengakibatkan keterlambatan distribusi. Keterlambatan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan musim tanam sehingga dapat mempengaruhi hasil produksi padi petani.

Selain berkenaan dengan ketersediaan saprodi dan benih, aspek lain dalam fasilitas adalah sejauhmana dukungan fasilitasi keuangan yang diberikan pemerintah dalam Program SL-PTT ini. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa menyatakan bahwa

kalau urusan keuangan, setiap kelompok membentuk pengurus dan membuat buku rekening dan melengkapi persyaratan teknis lainnya. Nah kalau sudah lengkap admnitrasinya maka uang tersebut akan ditransferkan ke rekening kelompok. Perlu diketahui bahwa bantuan keuangan tersebut hanya untuk areal LL saja. Jadi seperti itu mekanismenya.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa

Setelah melakukan identifikasi Lokasi dan Petani, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok tani yang akan menerima bantuan kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu yang mana di dalamnya dilengkapi nama kelompok, jumlah anggota, nama ketua kelompok, luas lahan , alamat kelompok tani sasaran, jumlah bantuan serta data lain yang diperlukan

Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “jika adminitrasinya sudah lengkap, maka bantuan keuangan akan disalurkan ke rekening masing-masing

kelompok. Namun terkadang ada kelompok yang lambat dalam mengusulkan jadi penyaluran dana juga terlambat”. Wawancara di atas menunjukkan bahwa selama ini pembayaran atau penyaluran keuangan langsung dari pusat ke rekening masing-masing kelompok tani setelah persyaratan administrasi terpenuhi, namun demikian bagi kelompok tani yang terlambat dalam melengkapi persyaratan administrasi maka akan terlambat pula penyaluran keuangan.

Selain dari kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi, ada perangkat peraturan dan mekanisme keuangan justru dapat memperlambat penyaluran keuangan dalam Program SL-PTT. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program SL-PTT dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan tentang Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Lainnya”. Merujuk pada pernyataan tersebut, Penyuluh harus selalu mendampingi kelompok tani untuk menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan penyaluran keuangan.

Aspek lainnya yang turut menentukan keberhasilan Program SL-PTT adalah ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan seperti tidak dalam sengketa, bebas dari banjir dan sesuai untuk melakukan

penanaman padi. Adapun data lahan SL-PTT di Kecamatan Tempunak adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Penetapan Lokasi Desa untuk Program Sekolah Lapangan**  
**Pengelolaan Tanaman Terpadu Kecamatan Tempunak (SL-PTT)**  
**Tahun 2013**

No	Desa	Luas Areal (Ha)	
		Sawah	Lahan Kering
1	Mensiap Baru	150	-
2	Gurung Mali	150	-
3	Sungai Buluh	150	-
4	Mengkurat Baru	75	-
5	Paribang Baru	175	-
6	Suka Jaya	25	-
7	Repak Sari	50	150
8	Mertijaya	175	-
9	Tinom Baru	125	-
10	Pangkal baru	125	-
11	Benua Kencana	75	-
12	Riam Batu	50	-
13	Jaya Mentari	100	-
14	Kuala Tiga	150	-
15	Sungai Buluh	-	100
Jumlah		1.550	250

Sumber : Surat Keputusan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kab Sintang Tahun 2013

Dari data di atas dapat dipahami bahwa setiap desa mempunyai cukup lahan untuk dibuka menjadi lahan pertanian padi. Kecamatan Tempunak yang merupakan kawasan Pengembangan dimana Kawasan pengembangan merupakan daerah yang tingkat produktivitasnya masih di bawah rata-rata produktivitas Provinsi serta potensi lahan yang masih luas. Luas areal SL-PTT Kecamatan Tempunak adalah lahan sawah 1.550 ha dan Lahan Kering 250 ha sehingga dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui pembelajaran dan penghayatan langsung (mengalami), mengungkapkan,

menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali), menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi.

Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam melakukan budidaya di lahan usahatannya berdasarkan spesifik lokasi sehingga petani menjadi lebih terampil serta mampu mengembangkan usahatannya dalam rangka peningkatan produksi padi. Namun demikian wilayah di luar SL-PTT harus tetap dilakukan pembinaan, pendampingan dan pengawalan sehingga produksi dan produktivitas tetap dapat meningkat.

Berkenaan dengan ketersediaan lahan untuk SL-PTT, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “secara umum luasan lahan cukup dan tidak ada masalah”. Hal senada juga disampaikan Penyuluh Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “dari jumlah luasan lahan cukup, namun SL-PTT mengharapkan adanya lahan yang berada dalam satu hamparan untuk satu kelompok. Hal ini karena untuk memudahkan bagi peserta kelompok untuk melihat, belajar, dan mengamati areal LL sebagai percontohan”.

Ketua Kelompok Kita Bersatu Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “sulit kalau mau mencari lahan untuk pertanian padi harus 24 atau 25 hektar dalam satu hamparan karena selain menanam padi,

banyak petani lainnya yang menanam karet dan sawit” (wawancara pada tanggal 8 Mei 2014). Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sulit untuk mencari lahan pertanian untuk menanam padi sejumlah 24 hektar dalam satu hamparan. Berkaitan dengan itu, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa

ada kendala tersendiri jika satu kelompok SL-PTT tidak dalam satu hamparan. Kendalanya adalah sulit untuk mengajak anggota kelompok tersebut untuk berkumpul dan melaksanakan pekerjaan di aeral lahan LL. Beberapa dari anggota harus melalui jalan memutar yang cukup jauh jika harus melewati LL untuk mencapai ladang atau sawahnya

Mengacu pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa jika dalam satu kelompok SL-PTT tidak dalam satu hamparan akan sulit untuk berkumpul. Selama ini ladang atau sawah petani masih tersebar di titik-titik (*spots*) tertentu.



Sumber: Observasi dan dokumentasi, 2013

**Gambar 4.7**  
**Areal Calon SL-PTT**

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang yang menyatakan bahwa:

Untuk mendapatkan lahan untuk kelompok dalam satu hamparan memang agak sulit mengingat bahwa jauh sebelum Program SL-PTT dilaksanakan, Kecamatan Tempunak merupakan salah satu kecamatan penghasil karet sehingga sebagian tanah masyarakat merupakan perkebunan karet, dan sebagian lagi telah diserahkan kepada perusahaan perkebunan sawit. Hal tersebut bukan hanya di Kecamatan Tempunak saja terjadi, namun juga di beberapa tempat. Hal inilah yang salah satunya menjadi penyebab pembangunan pertanian padi di Kecamatan Tempunak secara khusus dan Sintang pada umumnya berbeda dari daerah lainnya dan daerah Jawa.

Berangkat dari permasalahan sulitnya untuk mendapatkan lahan pertanian minimal 25 hektar dalam satu hamparan maka diperlukan perencanaan dan pemetaan tanah yang difungsikan untuk lahan pertanian dari unsur pertanian, perencanaan pembangunan, pertanahan dan penataan ruang dan wilayah. Untuk memaksimalkan usaha pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, perlu ditetapkan secara legal kawasan-kawasan khusus pertanian padi baik lahan kering maupun sawah dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa

Sampai saat ini, tahun 2013. Sepertinya belum ada secara khusus dalam RTRW Kabupaten Sintang yang mengatur kawasan pusat pertanian di setiap kecamatan. Apabila nanti sudah ada kawasan yang secara khusus dalam RTRW



Kabupaten maka pelaksanaan program SL-PTT ini akan semakin baik

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembangunan pertanian harus didukung dengan regulasi yang memadai pada tingkat kabupaten sendiri. Hasil observasi terhadap lahan pertanian Di Desa Gurung Mali adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 10**  
**Lahan Pertanian Di Desa Gurung Mali Pada Program SL-PTT**  
**Yang Terletak Dalam Satu Kelompok**

No	Nama Kelompok Tani	Lahan Sehamparan	
		Ada	Tidak ada
1	RIAM BERSI BERSATU		✓
2	LEBAK SANKIM		✓
3	HARAPAN MAJU		✓
4	KITA BERSATU		✓
5	PANGKAL MARSELUNG		✓
6	BARIYAU		✓

Sumber: Hasil Observasi, 2013

Dari hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada Kelompok Tani yang dalam satu kelompoknya yang lahan pertaniannya terletak dalam satu hamparan. Apabila dalam satu hamparan akan memudahkan pengawasan dan pembinaan serta alih teknologi dari LL kepada lahan yang dalam satu kelompok taninya. Berangkat dari pemahaman tersebut maka implementasi Program SL-PTT harus merupakan suatu sistem yang terintergrasi, dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai program dan bidang lainnya.

### c. Informasi

Selain aspek kesiapan dan ketersediaan sumber daya staf yang mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya serta fasilitas yang memadai, implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi. Informasi memegang peranan yang sangat dominan dan penting bagi seluruh organisasi. Informasi merupakan sekumpulan fakta yang sudah dicatat dan sudah disusun sedemikian rupa dan mempunyai makna, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Abidin (2012) menyatakan bahwa sebuah kebijakan dianggap berkualitas dan dapat dilaksanakan ditentukan oleh beberapa hal, yang salah satunya adalah informasi. Informasi tersebut adalah informasi yang cukup lengkap dan benar dan tidak kadaluarsa karena kebijakan apabila didasari oleh informasi yang tidak benar maka kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan.

Dalam keterkaitan dengan informasi, informasi yang penting dalam SL-PTT adalah tersedianya informasi yang memadai tentang seperti apa SL-PTT dilaksanakan, seperti tersedianya papan informasi dan papan lokasi aeral SL-PTT. Berkenaan dengan hal tersebut Penyuluh SL-PTT Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “setiap kelompok tani sudah ada papan alokasi yang terdiri dari nama program, nama kelompok, nama ketua kelompok, lokasi desa dan

kecamatan, luasan areal, tahun pelaksanaannya”. Adapun contoh papan alokasi SL-PTT di Desa Gurung Mali adalah sebagai berikut:



Sumber: Observasi dan dokumentasi, 2013.

**Gambar 4.8**  
**Papan Alokasi SL-PTT Kelompok Tani “KITA BERSATU”**  
**Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Tahun 2013**

Bentuk informasi lain yang tidak kalah penting adalah Laporan tertulis karena merupakan sumber informasi untuk mengevaluasi kegiatan program SL-PTT. Laporan juga sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas Program SL-PTT. Laporan kemajuan SL-PTT disusun oleh Penyuluh, Penyuluh SL-PTT desa Mertijaya menyatakan bahwa “laporan bulanan adalah kewajiban, terutama berkenaan dengan laporan realisasi keuangan dan penyaluran berbagai bantuan. Itu semua untuk bahan evaluasi sehingga tahapan kegiatan harus sesuai jadwal. Untuk laporan selalu kami sampaikan tepat waktu”.

Selain laporan dan penyajian informasi dalam bentuk papan informasi, pertukaran informasi antara garda depan (penyuluh) dan kelompok sasaran (kelompok tani) juga tidak kalah penting, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “informasi dalam program SL-PTT ini sangat penting. Namun secara umum tidak ada masalah dengan komunikasi karena hampir setiap desa sudah dapat terhubung dengan jaringan telpon seluler, meskipun di beberapa daerah terpencil masih belum. Intinya mereka selalu bisa menghubungi penyuluhnya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Kita Bersatu Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “selama ini belum ada masalah ya untuk menghubungi penyuluh, beliau selalu dapat dihubungi melalui HP kecuali jika sedang tidak ada sinyal”. Dari wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah berarti dalam ketersediaan informasi dalam Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak.

#### **d. Kewenangan**

Proses implementasi kebijakan dalam prespektif pengelolaan pemerintahan lebih menekankan kepada pengelolaan pemerintahan dengan sistem desentralisasi dimana adanya pelimpahan kewenangan pengambilan kebijakan dan tanggungjawab pelaksanaan kepada unit kerja atau unit organisasi pada jenjang yang lebih rendah. Kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Abidin (2012) menyatakan bahwa pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara umum ada 3 macam, yaitu:

- 1) Dekonsentrasi, dimana beban tugas organisasi pusat dikurangi dan kewenangan terpusat di organisasi pusat dilimpahkan ke organisasi di daerah yang disebut instansi vertikal.
- 2) Delegasi, adalah pelimpahan kewenangan oleh organisasi pusat kepada organisasi daerah (daerah otonom) namun pemerintah daerah tetap mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban ke organisasi pusat.
- 3) Devolusi, yaitu jika organisasi daerah yang sudah mempunyai kedudukan otonom sehingga daerah mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dan tidak mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Berkaitan dengan dengan model pelimpahan kewenangan tersebut di atas dan memperhatikan posisi keberadaan Program SLPTT, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “program SLPPT ini adalah program langsung di bawah Kementerian dan sifatnya program nasional. Sifatnya lebih kepada delegasi saja, karena kita melaksanakannya dengan petunjuk dari pusat dan secara berkala kami harus membuat pertanggungjawaban ke Kemeterian di Jakarta”. Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi Program SLPTT adalah tugas yang didelegasikan oleh pemerintahan pusat.

Berangkat dari makna dan jenis pelimpahan kewenangan maka perlu suatu pengaturan secara seksama sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik terutama berkenaan pembuatan keputusan dan kekuasaan untuk memerintah, serta distribusi tanggungjawab internal dalam program SLPTT di Kecamatan Tempunak. Implementasi Program SL-PTT yang semestinya menjalankan prinsip manajemen dengan baik tidak dapat dipisahkan dari bagaimana menyusun metode atau cara kerja dalam organisasi kerja. Pada tahap pengorganisasian, hal yang paling penting dilakukan adalah pengelompokan setiap individu dan sumber daya lainnya secara jelas. Pembagian tugas tersebut akan membagi habis seluruh pekerjaan dalam kelompok atau organisasi tersebut sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pembagian tugas sebagaimana dimaksud di atas jika dilakukan dengan benar maka akan melahirkan metode kerja dan pendistribusian kewenangan yang benar pula. Metode kerja yang benar sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua tugas dalam organisasi dilakukan dengan bagus, baik dan benar. Metode kerja ini juga harus mampu membagi habis tugas dan pekerjaan dan kewenangan pada setiap bagian organisasi. Pembagian kewenangan tersebut biasanya dilakukan dengan ditetapkannya sebuah Surat Keputusan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa “kalau untuk Surat keputusan kita sudah ada, yaitu

Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2013, Tanggal 28 Februari 2013 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial SL-PTT Padi Inbrida Sawah dan Padi Inbrida Lahan Kering Tahun Anggaran 2013”.

Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “semua sudah pegang SK. Setiap penyuluh yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas, termasuk para petani dan kelompok tani yang menerima Program SL-PTT”. Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa seluruh wewenang dan tugas masing aktor yang terlibat dalam Program SL-PTT sudah mengetahui dan memahaminya.

### 3. Disposisi

Keberhasilan impelmentasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementiors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Hakekat dibuatnya suatu kebijakan sudah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai sehingga kesesuaian tujuan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan tujuan individu atau kelompok baik dari pihak implementor maupun kelompok sasaran.

Disposisi atau sikap pelaksana adalah salah satu aspek penentu selain komunikasi dan sumber daya yang sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Berknaan dengan sikap, Hanggraeni (2011: 12) menyatakan bahwa sikap (*attitude*) sebenarnya berbeda dari perilaku (*behavior*), setidaknya ada tiga hal yang membangun sikap tersebut, yaitu (1) rasa percaya atau kepercayaan terhadap suatu hal, (2) adanya ikatan emosional atau perasaan senang terhadap suatu hal, dan (3) intensi untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau suatu hal.

Merujuk pada pernyataan ahli tersebut di atas, untuk mensukseskan implementasi sebuah kebijakan diperlukan rasa percaya terhadap kebijakan tersebut. Penerima manfaat harus mempercayai bahwa kebijakan tersebut memang mempunyai manfaat bagi mereka. Selanjutnya, setelah mempunyai kepercayaan terhadap kebijakan, penerima manfaat dan implementor harus menyukai kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya mempunyai ikatan emosional yang dalam. Dengan kepercayaan dan kebahagiaan terhadap kebijakan tersebut maka pada akhirnya para implementor dan penerima manfaat mampu dan mau melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati sehingga tercipta intensi untuk berperilaku seperti yang diinginkan para pembuat kebijakan.

Sikap pelaksana berhubungan dengan kesediaan dari para implementor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemampuan dan kecakapan semata tak akan cukup untuk melaksanakan kebijakan tanpa disertai oleh komitmen dan kesediaan. Kesediaan ini



dapat berupa sikap menerima dan mendukung implementasi kebijakan atau justru menolak kebijakan tersebut.

Sikap pelaku kegiatan SL-PTT sangat berpengaruh dalam menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program SL-PTT, sehingga diharapkan para implementator ini bisa menjaga sikap sehingga bias beradaptasi dengan lingkungan dan tentunya tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ada di dalam petunjuk teknis kegiatan.

Disposisi atau sikap merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan serta kepatuhan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga tujuannya dapat tercapai. Berkenaan dengan sikap pelaksana tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan sebagai instansi yang mempunyai tugas hingga mendampingi petani di lapangan, kami selalu mendukung. Apalagi Program SL-PTT ini sangat bagus, harapannya ya nanti terciptanya kemandirian pangan di tingkat desa dan pendapatan petani dapat terus meningkat.

Hal senada juga disampaikan oleh Penyuluh Desa Gurung Mali yang menyatakan “kami selalu mendukung. Bahkan para pera petani juga senang dengan adanya Program seperti SL-PPT”.

Dukungan juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Bariyau Desa Gurung Mali yang menyatakan bahwa “kami senang dengan program SL-PTT ini, kami berharap Program ini dapat terus ditingkatkan

lagi”. Mengacu pada hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh lapisan yang melaksanakan Program SL-PTT menerima dan mendukung program tersebut.

Dukungan penuh dengan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaksana Program SLPTT sangat penting karena komitmen merujuk pada kesungguhan para pelaksana untuk menjalankan program dan tugas yang telah diberikan kepadanya dengan kesungguhan dan motivasi tinggi dengan memanfaatkan seluruh modal dan potensi yang dimiliki. Berkenaan dengan hal tersebut Ketua Kelompok Tani Pangkal Marselung Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “motivasi kami ikut SLPTT ini adalah untuk kesejahteraan. Kalau produksi pertanian padi kami meningkat maka penghasilan kami juga bertambah sehingga bisa mencukupi biaya hidup bahkan nabung untuk sekolah anak nanti”.

Berkenaan dengan motivasi dan komitmen masyarakat, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “kalau untuk motivasi dan semangat petani sangat baik. Mereka antusias ikut SLPTT ini, mudah-mudahan semangat mereka tetap terjaga sampai mereka dapat hasil panen padi yang memuaskan”. Dari beberapa wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa petani sangat termotivasi untuk mengikuti Program SLPTT agar terjadi peningkatan kesejahteraan hidup.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Sebelum melakukan pemaknaan struktur birokrasi terlebih dahulu memahami makna birokrasi juga penting untuk melihat struktur organisasi birokrasi secara utuh. Rahman (2007:170) menyatakan bahwa

“birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan dan berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/ institusi”. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa birokrasi ada tidak lain untuk mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pembuatan dan pelaksanaan prosedur-prosedur yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan keadaan dimana organisasi tersebut berada.

#### a. Standart Operating Procedures (SOP)

Dalam implementasi kebijakan, jika kebijakan yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan harus melibatkan lebih dari satu unit maka harus disiapkan suatu standar tindakan berupa *Standard Operating Procedures* (SOP).

Berkenaan dengan SOP, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa

sampai saat ini SOP yang secara khusus untuk SL-PTT belum ada, namun semua tahapan dan bagaimana pelaksanaan kegiatan SL-PTT mengacu kepada Buku Petunjuk Teknis. Buku petunjuk tersebutlah yang jadi standar kita melaksanakan SL-PTT baik oleh penyuluh-penyuluh maupun petani

Hal senada juga diutarakan oleh Penyuluh Desa Gurung Mali yang menyatakan “kalau untuk SOP sepertinya belum ada”. Hal ini menunjukkan bahwa SOP secara khusus Program SL-PTT belum ada.

SOP juga akan mempengaruhi tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, semakin

memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil apa yang dapat dicapai atau dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Berkenaan dengan hal tersebut, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “ya walaupun SOP belum ada, namun dalam bertindak dan bekerja para petani dapat melakukan kegiatan penanaman padi seperti yang diharapkan. Kami tetap usahakan komunikasi petani dengan penyuluh dan antara petani tetap terjaga agar tidak ada masalah dan konflik nantinya”.

Berkenaan dengan keberadaan SOP, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa

dalam SL-PTT ini yang terpenting adalah adanya pedoman pelaksanaan berupa juknis itu. Dan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara kaku di lapangan karena tiap-tiap desa mempunyai kesulitan yang berbeda pula. Seandainya SL-PTT ini bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat maka mutlaklah kita harus berdasarkan SOP. Jadi untuk sementara ini SL-PTT ini sudah dapat dilaksanakan hanya dengan buku pedoman teknis

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa meskipun belum dilengkapi SOP, namun kepatuhan kelompok tani tetap terjaga dengan baik sehingga kegiatan SL-PTT masih berjalan dengan baik, selain itu tidak ada konflik yang berarti yang dapat mempengaruhi kelancaran program, karena hubungan yang kurang harmonis diantara pelaku program ini cenderung akan menimbulkan

perbedaan disposisi diantara mereka dalam melaksanakan program, sehingga dampak ketidakharmonisan tersebut dapat berujung kegagalan.

Kejelasan ini akan memudahkan seseorang dalam menetapkan disposisi diri dan organisasinya dalam melaksanakan program. Manakala manfaat dan keuntungan program ini diketahui sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, niscaya disposisi bagi para pelaku dan organisasi pelaksana akan tinggi. Tingginya disposisi para pelaku dan organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan.

#### **b. Fragmentasi**

Dalam implementasi Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak khususnya di Desa Gurung Mali secara umum melibatkan banyak unit kerja baik di tingkat pusat terutama pada level kementerian dan di tingkat Kabupaten Sintang. Konsekuensi dari hal tersebut aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi tersebut semakin banyak.

Jenis implementasi yang melibatkan banyak bidang dan organisasi sudah tentu memerlukan koordinasi antar unit organisasi. Purwanto (2012) menyatakan bahwa “agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka seluruh *stakeholder*, terutama penanggungjawab utama implementasi, perlu memahami mekanisme

kerja yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi”.

Di dalam dimensi fragmentasi menegaskan struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan potensi gagalnya komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksinya akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yurisdiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan sumber daya, sehingga dapat dikatakan organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang akan menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin struktur birokrasi terfragmentasi pelaku kebijakan, semakin besar menimbulkan konflik di antara mereka. Akibatnya, hubungan di antara mereka menjadi tidak harmonis. Berkaitan dengan keharmonisan antara pihak-pihak yang terlibat dalam SL-PTT di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa:

Sampai saat ini jika berkenaan dengan keharmonisan para pelaksana program SL-PTT di lapangan selalu baik. Untuk masalah birokrasi memang cukup panjang juga rentangnya sampai ke jenjang petani di desa, masalah yang sering terjadi menyangkut masalah birokrasi adalah keterlambatan masuknya persyaratan pencairan keuangan dari petani, namun masalah ini terus dibenahi agar jangan sampai menjadi hambatan program ke depannya.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “sejauh ini hambatan koordinasi tidak terjadi dan program dapat berjalan dengan baik. Seluruh pihak yang terlibat dalam Program SL-PTT dapat berkerja dengan harmonis”. Berkenaan dengan koordinasi dalam SL-PTT, Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “secara umum kegiatan dalam SL-PTT dapat berjalan lancar. Namun diakui kalau untuk koordinasi dengan petani di lapangan memang ada kendala. Kadang-kadang ada kala petani memerlukan bimbingan atau masalah dalam melakukan pengelolaan kebun”.

Merujuk pada hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan SL-PTT dapat tetap berjalan namun diakui bahwa penyuluh tidak selalu bisa hadir dalam mendampingi petani. Lebih lanjut Penyuluh Desa Gurung Mali menyatakan bahwa “secara ideal memang ada penyuluh yang tinggal di desa, namun kendala lain adalah belum ada rumah bagi penyuluh dan beberapa penyuluh bertugas lebih dari satu desa”.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya mengenai Implementasi program Sekolah Lapangan Pengenalan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2013, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan dalam Program SL-PTT berupa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang dengan mempedomani Buku Petunjuk Teknis telah tersedia dan telah dibahas bersama oleh Dinas terkait dan Penyuluh sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sejauh ini tidak terjadi pertentangan antara peraturan dalam Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.
2. Sumber daya staf dalam hal ini jumlah penyuluh belum proporsional dengan jumlah desa dan jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Tempunak secara khusus Penyuluh Lapangan Desa Gurung Mali juga memegang Desa Sungai Buluh sehingga pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh tidak optimal. Belum semua anggota kelompok tani mendapat saprodi serta suplai benih unggul masih bergantung dari pasokan dari luar daerah. Lahan pertanian SL-PTT tidak dalam satu hamparan sesuai yang



dipersyaratkan sehingga menghambat pelaksanaan penyuluhan bagi anggota kelompok tani.

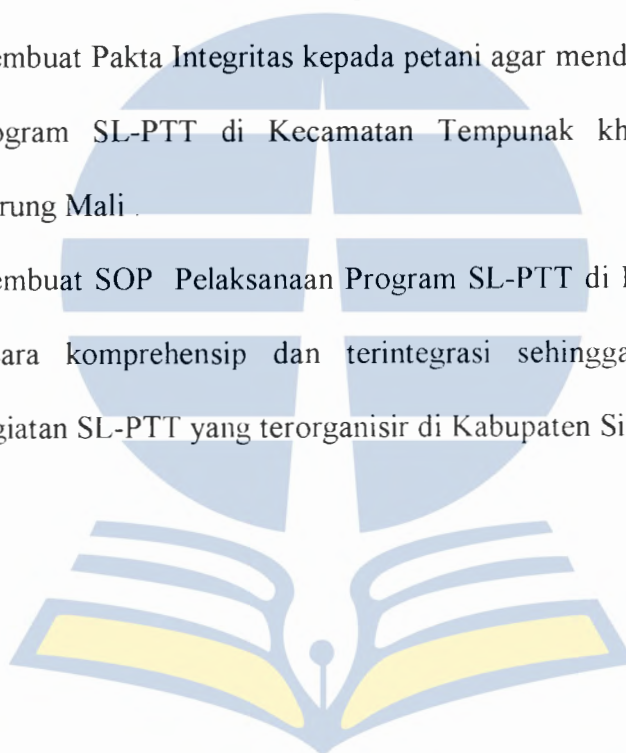
3. Disposisi atau sikap pelaksana dari seluruh pihak yang terlibat dalam Program SL-PTT menerima dan menyambut baik Program SL-PTT ini. Namun sejauh ini dukungan kesediaan dimaksud masih berupa kesediaan lisan.
4. Struktur birokrasi dalam program SL-PTT di Kabupaten Sintang belum mempunyai SOP tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan merujuk kepada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis SL-PTT. Fragmentasi tidak terjadi dan seluruh komponen yang terlibat dalam Program SL-PTT dapat bekerja dengan baik dan harmonis.

## **B. Saran**

Berangkat dari rumusan simpulan di atas, maka ada beberapa saran penting yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu agar :

1. Sosialisasi dan Pelatihan dalam Program SL-PTT harus terus dilakukan dengan intensip agar petani dapat memperoleh informasi yang memadai untuk melaksanakan Program SI-PTT sehingga produktifitas padi meningkat.
2. Dinas terkait untuk :
  - a. mengalokasikan penambahan personil penyuluh ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.

- b. Menyusun regulasi agar daerah mengalokasikan dana pendampingan penyediaan saprodi bagi anggota kelompok tani di luar lahan Laboratorium Lapangan.
  - c. Menumbuhkan kembali sentra benih unggul di Kabupaten Sintang.
  - d. Mengatur pola dan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Sintang secara khusus untuk kawasan pertanian satu hamparan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sintang.
3. Membuat Pakta Integritas kepada petani agar mendukung sepenuhnya Program SL-PTT di Kecamatan Tempunak khususnya di Desa Gurung Mali .
  4. Membuat SOP Pelaksanaan Program SL-PTT di Kabupaten Sintang secara komprehensif dan terintegrasi sehingga tercipta sebuah kegiatan SL-PTT yang terorganisir di Kabupaten Sintang.



**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik.*, Jakarta, Salemba Humanika
- Agustino, Leo. (2007). *Perihal Ilmu Politik, Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik.* Yogyakarta, Graha Ilmu,
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat.*, Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Godono. (2012). *Teori Organisasi; Edisi Kedua.* Yogyakarta, BPFE-
- Hanggraeni, Dewi. (2011). *Perilaku Organisasi.* Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Irawan, Prasetya. (2011). *Metode Penelitian Administrasi.* Jakarta, Universitas Terbuka,
- Moleong, Lexi, J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
- Nugroho, Riant. (2011). *Publik Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan.* Jakarta, PT. Alex Media Komputindo,
- Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung, CV. Alfabeta,
- Purwanto, dkk (2012). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia.* Yogyakarta., Gava Media,
- Rahman, A.H.I. (2007). *Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta.* . Graha Ilmu
- Syafei, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).*, Jakarta, Bumi Aksara
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP),
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi).* Bandung, Penerbit Alfabeta,
- Wahab, SA. (2004). *Analisis Kebijaksanaan, Edisi Kedua, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta. PT. Bumi Aksara,

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta. CAPS,

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Tempunak Dalam Angka Tahun 2014*, Kabupaten Sintang.

### **WEBSITE**

<http://biotaniindonesia.blogspot.com/2013/10/pangan-tidak-jelek-tapi-import-meningkat.html>

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20140809160536-92-1344>

<http://bilongtuyu.blogspot.com/2014/01/sarana-produksi-pada-sektor-pertanian.html>

### **PERATURAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013 tentang Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT).

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang

### **KARYA ILMIAH**

Husnul Hotimah, 2011, *Dampak Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Dari Aspek Produksi dan Pendapatan Serta Strategi Pengembangannya*, Universitas Jember.

Najmah Faizah, 2012, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui Program Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Non Hibrida (Studi Kasus Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)*.

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### 1. Komunikasi

##### a. Transmisi

1. Apakah isi program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 pernah disampaikan oleh Dinas Teknis kepada Kelompok Petani sebagai penerima manfaat?
2. Bagaimana bentuk transmisi dalam komunikasi program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 kepada Kelompok Petani?
3. Bagaimana sosialisasi program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 dilaksanakan? Apakah melalui tatap muka, media cetak, atau media elektronik?
4. Di manakah sosialisasi di laksanakan?

##### b. Kejelasan

1. Apakah program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 sudah cukup jelas untuk dilaksanakan di lapangan?
2. Apakah buku petunjuk atau pedoman pelaksanaan SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 sudah ada?

##### c. Konsistensi

1. Apa dasar hukum pelaksanaan Program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?
2. Apakah ada dasar hukum atau peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?

## 2. Sumber Daya

### a. Staf

1. Bagaimana kemampuan petani dalam menanam padi dan melaksanakan Program SL-PTT di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak Tahun 2013?
2. Bagaimana tingkat pendidikan dan keterampilan penyuluh pertanian dalam mendampingi Kelompok Petani SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?
3. Bagaimana ketersediaan jumlah tenaga penyuluh pertanian dalam mendampingi Kelompok Petani dalam pelaksanaan SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?

### b. Fasilitas

1. Bagaimana ketersediaan prasarana (kantor dan rumah) dalam mendukung SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?
2. Apakah alat/sarana produksi pertanian sudah tersedia untuk Kelompok Petani telah tersedia dalam pelaksanaan SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?
3. Sejauhmana bantuan keuangan diberikan oleh pemerintah kepada Kelompok Petani dalam pelaksanaan SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?

### c. Wewenang

1. Apakah telah ada pembagian kewenangan yang jelas bagi penyuluh dan kelompok tani dalam SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?

2. Apakah sudah ada Surat Keputusan yang mengatur pelaksanaan SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?

**d. Informasi**

1. Apakah akses informasi yang dapat menunjang pelaksanaan SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 telah tersedia?
2. Apakah informasi yang berhubungan dengan dalam program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 telah disajikan dalam bentuk tertentu sehingga dapat diperoleh oleh Penyuluh maupun Kelompok Tani?

**3. Disposisi/Sikap Pelaksana**

Apakah setiap individu dan kelompok yang terlibat dalam program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 menerima atau menolak program tersebut?

**4. Struktur Birokrasi**

**a. Standar Operating Procedures (SOP)**

Apakah Program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013 telah mempunyai SOP?

**b. Fragmentasi**

Apakah ditemukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan program SLPTT di Kabupaten Sintang Tahun 2013?

## Lampiran 2

**DAFTAR OBSERVASI  
(CHECK LIST)**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH  
 LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN  
 TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI  
 KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA  
 GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
 KABUPATEN SINTANG)

No	Item Yang Diamati	Ket	
		Ada	Tidak
1	Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT	✓	
2	Buku Rekening Kelompok Petani SL-PTT	✓	
3	Pupuk	✓	
4	Pestisida	✓	
5	Lahan pertanian 1 kelompok sehamparan		✓
6	Papan Nama Alokasi SL-PTT	✓	
7	Benih	✓	
8	Handtractor		✓
9	SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikan Kab Sintang	✓	
10	SOP		✓

Observasi dilaksanakan di:

Kelompok : BARIYAU  
 Desa : Gurung Mali  
 Kecamatan : Tempunak  
 Kabupaten : Sintang

Pada Hari Selasa, 8 Mei 2014

Oleh:

**ALBINA SRIPARSA**



## Lampiran 2

**DAFTAR OBSERVASI  
(CHECK LIST)**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH  
 LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN  
 TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI  
 KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA  
 GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
 KABUPATEN SINTANG)

No	Item Yang Diamati	Ket	
		Ada	Tdk. Ada
1	Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT	✓	
2	Buku Rekening Kelompok Petani SL-PTT	✓	
3	Pupuk	✓	
4	Pestisida	✓	
5	Lahan pertanian 1 kelompok schamparan		✓
6	Papan Nama Alokasi SL-PTT	✓	
7	Benih	✓	
8	Handtractor		✓
9	SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikan Kab Sintang	✓	
10	SOP		✓

Observasi dilaksanakan di:

Kelompok : LEBAK SANKIM  
 Desa : Gurung Mali  
 Kecamatan : Tempunak  
 Kabupaten : Sintang

Pada Hari Selasa, 8 Mei 2014

Oleh:

**ALBINA SRIPARSA**

## Lampiran 2

**DAFTAR OBSERVASI  
(CHECK LIST)**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH  
 LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN  
 TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI  
 KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA  
 GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
 KABUPATEN SINTANG)

No	Item Yang Diamati	Ket	
		Ada	Tidak
1	Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT	✓	
2	Buku Rekening Kelompok Petani SL-PTT	✓	
3	Pupuk	✓	
4	Pestisida	✓	
5	Lahan pertanian 1 kelompok sehamparan		✓
6	Papan Nama Alokasi SL-PTT	✓	
7	Benih	✓	
8	Handtractor		✓
9	SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikan Kab Sintang	✓	
10	SOP		✓

Observasi dilaksanakan di:

Kelompok : HARAPAN MAJU  
 Desa : Gurung Mali  
 Kecamatan : Tempunak  
 Kabupaten : Sintang

Pada Hari Selasa, 8 Mei 2014

Oleh:

**ALBINA SRIPARSA**

## Lampiran 2

**DAFTAR OBSERVASI  
(CHECK LIST)**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH  
 LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN  
 TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI  
 KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA  
 GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
 KABUPATEN SINTANG)

No	Item Yang Diamati	Ket	
		Ada	Tidak
1	Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT	✓	
2	Buku Rekening Kelompok Petani SL-PTT	✓	
3	Pupuk	✓	
4	Pestisida	✓	
5	Lahan pertanian I kelompok schamparan		✓
6	Papan Nama Alokasi SL-PTT	✓	
7	Benih	✓	
8	Handtractor		✓
9	SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikan Kab Sintang	✓	
10	SOP		✓

Observasi dilaksanakan di:

Kelompok : KITA BERSATU  
 Desa : Gurung Mali  
 Kecamatan : Tempunak  
 Kabupaten : Sintang

Pada Hari Selasa, 8 Mei 2014

Oleh:

**ALBINA SRIPARSA**

## Lampiran 2

**DAFTAR OBSERVASI  
(CHECK LIST)**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH  
 LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN  
 TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI  
 KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA  
 GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
 KABUPATEN SINTANG)

No	Item Yang Diamati	Ket	
		Ada	Tidak
1	Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT	✓	
2	Buku Rekening Kelompok Petani SL-PTT	✓	
3	Pupuk	✓	
4	Pestisida	✓	
5	Lahan pertanian 1 kelompok sehamparan		✓
6	Papan Nama Alokasi SL-PTT	✓	
7	Benih	✓	
8	Handtractor		✓
9	SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikan Kab Sintang	✓	
10	SOP		✓

Observasi dilaksanakan di:

**Kelompok** : PANGKAL MARSELUNG  
**Desa** : Gurung Mali  
**Kecamatan** : Tempunak  
**Kabupaten** : Sintang

Pada Hari Selasa, 8 Mei 2014

Oleh:

**ALBINA SRIPARSA**

## Lampiran 2

**DAFTAR OBSERVASI  
(CHECK LIST)**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)

No	Item Yang Diamati	Ket	
		Ada	Tdk. Ada
1	Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT	✓	
2	Buku Rekening Kelompok Petani SL-PTT	✓	
3	Pupuk	✓	
4	Pestisida	✓	
5	Lahan pertanian 1 kelompok schamparan		✓
6	Papan Nama Alokasi SL-PTT	✓	
7	Benih	✓	
8	Handtractor		✓
9	SK Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikan Kab Sintang	✓	
10	SOP		✓

Observasi dilaksanakan di:

Kelompok : RIAM BERSI BERSATU  
 Desa : Gurung Mali  
 Kecamatan : Tempunak  
 Kabupaten : Sintang

Pada Hari Selasa, 8 Mei 2014

Oleh:

**ALBINA SRIPARSA**

Lampiran 3

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : Ir. ROBINSON  
**Jabatan** : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG  
**Waktu Wawancara** : 6 MEI 2014

1.	Komunikasi	
	a.	Transmisi Program
	1)	Apakah Komunikasi Program SL-PTT sudah pernah dilakukan? Sudah pernah
	2)	Dalam bentuk apa saja komunikasi Program SL-PTT yang telah dilakukan? kalau bentuk komunikasi yang kita lakukan dalam SLPTT adalah sosialisasi tatap muka dan pakai pamflet. Kita tatap muka karena skop penerima bantuan kan di tingkat desa saja dan bisa ditangani oleh satu penyuluh sekaligus
	3)	Sejak tahun berapa Program SL-PTT dilaksanakan? SL-PTT di Kabupaten Sintang ini sudah ada sejak tahun 2008 sampai sekarang, setiap tahun Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang selalu melaksanakan sosialisasi terutama kepada kelompok yang baru menerima program ini.
	4)	Bagaimana tahapan pelaksanaan Program SL-PTT di Kabupaten Sintang? Tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan SL-PTT ini adalah dengan melakukan Sosialisasi. Pertama-tama dimulai Sosialisasi Program kepada Petugas dan Kelompok Tani, Menyusun Petunjuk Teknis, Melakukan seleksi dan Verifikasi terhadap kelompok tani beserta

			<p>Rencana Umum Kelompok, kemudian Tim melakukan atau mengusulkan kepada saya kelompok tani yang memenuhi syarat untuk ditetapkan, kemudian melakukan pengawasan penyaluran bantuan, melakukan pembinaan kepada kelompok tani, monitoring dan evaluasi, menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi. Ini merupakan tahapan-tahapan yang perlu di komunikasikan dengan baik kepada petugas pelaksana maupun masyarakat petani atau kelompok tani.</p>
	5)	Apakah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Program SL-PTT?	<p>sebenarnya, salah satu kunci keberhasilan SL-PTT ini adalah koordinasi yang baik antara tingkat terbawah, yang dalam hal ini kelompok tani, tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat. Kalau mengacu kepada bagan skema pelaksanaan SL-PTT di buku pedoman, kabupaten ada di posisi posko tingkat 3. Di bawahnya ada kecamatan di posko 4 dan tingkat desa ada di posko 5</p>
	6)	Siapakah yang bertanggung jawab pada setiap jenjang atau posko dalam Program SL-PTT?	<p>kalau di tingkat pusat, penanggungjawabnya adalah Dirjen Tanaman Pangan, pada tingkat Provinsi sebagai penanggungjawa adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Sedangkan untuk kabupaten, sebagai penanggungjawabnya adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Sedangkan penggungjawa di tingkat kecamatan penanggungjawabnya adalah koordinator penyuluh kecamatan. Nah, sebagai penanggungjawab di tingkat desa</p>

			adalah masing penyuluh sesuai dengan wilayah desa yang dibinanya
<b>b. Kejelasan</b>			
	1)	Apakah telah tersedia buku yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program SL-PTT?	buku petunjuk sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan SL-PPT ini sudah ada. Itu sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013 tentang Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2013
	2)	Apakah sudah ada pembahasan terhadap buku pedoman tersebut agar perbedaan pemahaman terhadap buku tersebut?	seluruh PPL di lapangan sudah dilatih dan dikumpulkan terkait SLPTT. Para PPL sudah dikumpulkan dan membahas bersama buku pedoman ini dan seperti apa aksi di lapangan nantinya. Dinas berusaha meminimalisir agar program ini tidak bias di lapangan dan jangan sampai apa yang ada di Buku Pedoman mensyaratkan A tetapi di lapangan nanti jadi B.
	3)	Apakah Petani sudah mendapatkan buku petunjuk teknis Program SL-PTT?	buku pedoman sudah disampaikan juga kepada petani dengan harapan mereka bisa mempelajarinya sehingga mereka mengerti tujuan dan bagaimana melaksakan SL-PTT ini. Kalau mereka sudah paham tujuan kegiatan ini dan memang sejalan dengan tujuan mereka pastilah kegiatan ini akan lancar
	4)	Siapakah yang membuat buku pedoman teknis SL-PTT?	jadi begini, secara umumnya, buku petunjuk sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan SL-PPT ini sudah ada dan itu sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor



			6/HK.310/C/1/2013 tentang Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengenalan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2013. Untuk menjabarkan peraturan atau juknis dari pusat tersebut, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Sintang juga menyusun juknis sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sintang ini
c. Konsistensi			
	1)	Apakah sejauh ini ada pertentangan antara kebijakan-kebijakan dalam Program SL-PTT?	sejauh ini tidak ada peraturan yang bertentangan antara peraturan yang menyangkut SL-PTT ini. Dalam Program ini kami hanya merujuk pada buku Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 6/HK.310/C/1/2013 tentang Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2013
2. Sumber Daya			
a. Staf			
	1)	Bagaimana tingkat pendidikan Personil yang terlibat dalam Program SL-PTT?	kalau berbicara masalah kualitas penyuluh dalam mendampingi petani, kami sama sekali tidak ragu. Nah kalau sudah berbicara soal jumlah penyuluh yang proporsional dengan jumlah kelompok tani sekarang itu masih jauh dari sesuai
	2)	Apakah Penyuluh pernah mendapat pelatihan secara khusus untuk Program SL-PTT?	Pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyuluh sudah dilakukan. Pelatihan tersebut dilakukan secara berturut-turut sejak tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Kenapa tahun 2013 yang lalu tidak ada pelatihan? Karena pada

			<p>dasarnya secara kemampuan dan keterampilan dalam ilmu pertanian dan bercocok tanam sangat baik. Hanya saja yang perlu penyesuaian adalah jika ada perubahan-perubahan aturan dan kebijakan pertanian dalam program SL-PTT ini. Tahun 2013 lalu, hampir tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Sehingga pelatihan tidak dilakukan lagi.</p>
	<b>b.</b>	<b>Fasilitas</b>	
	1)	Apa saja fasilitas yang diterima oleh petani dalam Program SL-PTT?	<p>Bantuan kepada petani dalam suatu kelompok tani adalah dalam bentuk bantuan sosial dengan pola bantuan langsung masyarakat (BLM) dalam bentuk bantuan dana untuk pembelian pupuk urea, NPK, Pupuk Organik atau dolomite/kapur putih untuk Laboratorium Lapangan (LL) seluas 1 hektar pada setiap unit SL-PTT serta ada diberikan biaya pertemuan, insentif pendamping, dan papan nama sesuai alokasi untuk kegiatan SL-PTT yang diberikan dengan cara ditransfer ke rekening kelompok tani. Dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang juga ada memberikan bantuan <b>Alsintan dan lain-lain</b></p>
	2)	Apakah ada fasilitasi untuk bantuan benih atau bibit padi dalam Program SL-PTT?	<p>bantuan benih unggul selalu ada untuk para petani SL-PTT, namun benih unggul itu masih didatangkan dari luar kalimantan. Sampai saat ini kita masih mengandalkan pasokan dari Jawa</p>
	3)	Bagaimana mekanisme fasilitasi Keuangan yang diberikan kepada petani dalam Program SL-PTT?	<p>kalau urusan keuangan, setiap kelompok membentuk pengurus dan membuat buku rekening dan melengkapi persyaratan teknis lainnya. Nah kalau sudah lengkap admnitrasinya maka uang</p>

			tersebut akan ditransferkan ke rekening kelompok. Perlu diketahui bahwa bantuan keuangan tersebut hanya untuk areal LL saja. Jadi seperti itu mekanismenya
		4) Bagaimanakah penentuan kelompok tani yang mendapat Program SL-PTT?	Setelah melakukan identifikasi Lokasi dan Petani, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok tani yang akan menerima bantuan kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu yang mana didalamnya dilengkapi nama kelompok, jumlah anggota, nama ketua kelompok, luas lahan, alamat kelompok tani sasaran, jumlah bantuan serta data lain yang diperlukan
		5) Bagaimana mekanisme pencairan dana dalam Program SL-PTT?	Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program SL-PTT dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan tentang Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Lainnya
		6) Bagaimana ketersediaan lahan dalam Program SL-PTT?	secara umum luasan lahan cukup dan tidak ada masalah
	c.	Informasi	
		1) Bagaimana akses informasi dalam Program SL-PTT?	informasi dalam program SL-PTT ini sangat penting. Namun secara umum tidak ada masalah dengan komunikasi karena hampir setiap desa sudah dapat terhubung dengan jaringan telpon seluler, meskipun di beberapa daerah terpencil masih belum. Intinya mereka selalu bisa menghubungi penyuluhnya

d. Kewenangan		
1)	Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas?	kalau untuk Surat keputusan kita sudah ada, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang Nomor 08 Tahun 2013, Tanggal 28 Februari 2013 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial SL-PTT Padi Inbrida Sawah dan Padi Inbrida Lahan Kering Tahun Anggaran 2013
3. Disposisi		
a.	Apakah pihak yang terlibat dalam Program SL-PTT menerima dan mendukung Program tersebut?	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan sebagai instansi yang mempunyai tugas hingga mendampingi petani di lapangan, kami selalu mendukung. Apalagi Program SL-PTT ini sangat bagus, harapannya ya nanti terciptanya kemandirian pangan di tingkat desa dan pendapatan petani dapat terus meningkat.
b.	Bagaimana motivasi pihak yang terlibat dalam Program SL-PTT?	kalau untuk motivasi dan semangat petani sangat baik. Mereka antusias ikut SLPTT ini, mudah-mudahan semangat mereka tetap terjaga sampai mereka dapat hasil panen padi yang memuaskan
4. Struktur Birokrasi		
a. <i>Standar Operational Procedures (SOP)</i>		
1)	Apakah SOP dalam Program SL-PTT telah ada?	sampai saat ini SOP yang secara khusus untuk SL-PTT belum ada, namun semua tahapan dan bagaimana pelaksanaan kegiatan SL-PTT mengacu kepada

		Buku Petunjuk Teknis. Buku petunjuk tersebutlah yang jadi standar kita melaksanakan SL-PTT baik oleh penyuluh-penyuluh maupun petani
	2) Bagaimanakah cara pelaksanaan program SL-PTT tanpa SOP?	dalam SL-PTT ini yang terpenting adalah adanya pedoman pelaksanaan berupa juknis itu. Dan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara kaku di lapangan karena tiap-tiap desa mempunyai kesulitan yang berbeda pula. Seandainya SL-PTT ini bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat maka mutlaklah kita harus berdasarkan SOP. Jadi untuk sementara ini SL-PTT ini sudah dapat dilaksanakan hanya dengan buku pedoman teknis
	<b>b. Fragmentasi</b>	
	Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan dari Tim Pelaksana yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	Sampai saat ini jika berkenaan dengan keharmonisan para pelaksana program SL-PTT di lapangan selalu baik. Untuk masalah birokrasi memang cukup panjang juga rentangnya sampai ke jenjang petani di desa, masalah yang sering terjadi menyangkut masalah birokrasi adalah keterlambatan masuknya persyaratan pencairan keuangan dari petani, namun masalah ini terus dibenahi agar jangan sampai menjadi hambatan program ke depannya.

Lampiran 3

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH  
 LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN  
 TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI  
 KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA  
 GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
 KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : SUHARJO  
**Jabatan** : PENYULUH PERTANIAN WILAYAH  
 GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK  
**Waktu Wawancara** : 7 MEI 2014

1.	Komunikasi		
	a.	Transmisi Program	
	1)	Apakah komunikasi dalam Program SL-PTT sudah dilakukan?	sudah
	2)	Dalam bentuk apa saja komunikasi Program SL-PTT yang telah dilakukan?	para penyuluhlah yang melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi hingga ke masyarakat di desa, mulai dari apa saja kegiatan SL-PTT ini, bagaimana melaksanakannya, sampai cara menanam hingga panen padi masih didampingi
	3)	Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi dalam Program SL-PTT?	Salah satu upaya kita menerapkan program Sekolah Lapangan Pengenalan Tanaman Terpadu (SL-PTT) kepada petani agar sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku adalah dengan melakukan komunikasi dan pembinaan dilapangan, Kami melakukan sosialisasi dan pembinaan di lapangan dengan cara kunjungan ke lapangan yaitu ke kelompok taninya mengajak petani untuk menentukan kapan penggarapan lahan dapat dimulai, penyemaian dan penanaman. Setelah itu baru kami bersama-sama musyawarah di tingkat desa kapan kiranya atau menyesuaikan waktu tetapi tidak boleh lewat dari musim tanam untuk melakukan penanaman padi secara bersama-sama dan

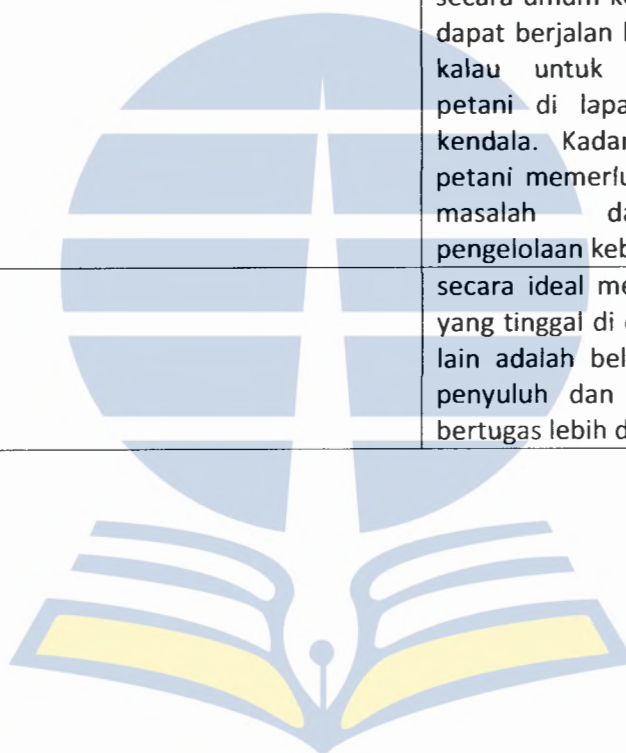
				tentunya kami menyampaikan bahwa kegiatan ini bersifat bantuan dari Pemerintah yang harus dikerjakan dengan baik karena hasilnya adalah untuk petani itu sendiri dalam rangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani itu sendiri.
	b.	Kejelasan		
		1)	Apakah telah tersedia buku yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program SL-PTT?	Buku Pedomannya itu sudah ada, dan itu wajib jadi pegangan kami, di dalamnya sudah jelas semua latar belakang program sampai teknisnya
		2)	Apakah sudah ada pembahasan terhadap buku pedoman tersebut agar perbedaan pemahaman terhadap buku tersebut?	sebelum ke lapangan, setiap tahunnya Penyuluh-Penyuluh selalu disosialisasikan dan membahas bersama buku juknis yang diturunkan dari pusat dan pedoman yang dibuat oleh Dinas Kabupaten. Hal tersebut penting karena biasanya ada perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan setiap tahunnya sehingga pembahasan buku petunjuk sangat perlu sebelum turun ke lapangan
		3)	Apakah para petani sudah mendapatkan Buku Petunjuk Teknis Program SL-PTT?	Buku Petunjuk Teknis SL-PTT tersebut sudah disampaikan ke Kelompok Tani, itu harus menjadi rujukan untuk seluruh petani termasuk juga penyuluhnya
	c.	Konsistensi		
		1)	Apakah sejauh ini ada pertentangan antara kebijakan-kebijakan dalam Program SL-PTT?	Belum ada
2.	Sumber Daya			
	a.	Staf		
		1)	Bagaimana jumlah tenaga penyuluh yang ada?	Pembinaan selama ini telah dilakukan secara terus menerus, baik di lokasi SL-PTT maupun di Luar Lokasi SL-PTT dan memang kami merasa kekurangan jumlah dari Penyuluh, dan karena

			luasnya lokasi kegiatan kadang-kadang waktu kami memang terbatas untuk melakukan pembinaan, tapi alhamdulillah waktu pertemuan atau kunjungan kami ke lapangan petaninya banyak bertanya untuk hal-hal yang mereka tidak tahu
		2) Apakah penyuluh sudah pernah mendapat pelatihan SL-PTT?	pelatihan sudah dilakukan kepada seluruh penyuluh. Penyuluh pertanian dituntut untuk dapat maksimal dalam membimbing petani terutama dengan teknologi pertanian yang relatif masih baru bagi mereka
	<b>b.</b>	<b>Fasilitas</b>	
		1) Apakah bantuan Saprodi sudah diberikan untuk petani?	sampai saat ini yang dapat bantuan saprodi hanya 1 hektar yang menjadi Laboratorium Lapangan saja
		2) Apakah petani mendapatkan bantuan benih?	untuk urusan benih kita masih mengandalkan distribusi dari Luar Sintang karena penangkar benih belum mampu menyediakan sesuai kebutuhan petani di Sintang ini. Akibatnya pasokan benih tersebut sering terlambat dan itu sudah menjadi masalah secara nasional
		3) Bagaimana penyaluran bantuan keuangan dalam Program SL-PTT?	jika adminitrasinya sudah lengkap, maka bantuan keuangan akan disalurkan ke rekening masing-masing kelompok. Namun terkadang ada kelompok yang lambat dalam mengusulkan jadi penyaluran dana juga terlambat
		4) Bagaimana pengaturan lahan dalam Program SL-PTT?	dari jumlah luasan lahan cukup, namun SL-PTT mengharapkan adanya lahan yang berada dalam satu hamparan untuk satu kelompok. Hal ini karena untuk memudahkan bagi peserta kelompok untuk melihat, belajar, dan mengamati areal LL sebagai percontohan



	5)	Apa saja kendala dalam fasilitasi Program SL-PTT?	ada kendala tersendiri jika satu kelompok SL-PTT tidak dalam satu hamparan. Kendalanya adalah sulit untuk mengajak anggota kelompok tersebut untuk berkumpul dan melaksanakan pekerjaan di areal lahan LL. Beberapa dari anggota harus melalui jalan memutar yang cukup jauh jika harus melewati LL untuk mencapai ladang atau sawahnya
	c.	Informasi	
	1)	Apakah anda mempunyai cukup informasi mengenai bagaimana melaksanakan Program SL-PTT?	Kalau informasi cukup lancar, biasanya informasi yang sifatnya segera lewat HP.
	d.	Kewenangan	
	1)	Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas?	semua sudah pegang SK. Setiap penyuluh yang bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Sintang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas, termasuk para petani dan kelompok tani yang menerima Program SL-PTT
	3.	Disposisi	
	a.	Apakah anda menerima dan mendukung Program SL-PTT?	kami selalu mendukung. Bahkan para petani juga senang dengan adanya Program seperti SL-PPT
	b.	Apa harapan anda dalam Program SL-PTT ini?	Harapan ya pastinya agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti tersedia pangan di tingkat desa dan pendapatan petani meningkat.
	4.	Struktur Birokrasi	
	a.	Standar Operational Procedures (SOP)	
	1)	Apakah <i>Standart Operating Procedures</i> (SOP) dalam Program SL-PTT ini sudah ada?	kalau untuk SOP sepertinya belum ada
	2)	Adakah kendala jika belum ada	ya walaupun SOP belum ada, namun

		SOP dala Program SL-PTT ini?	dalam bertindak dan bekerja para petani dapat melakukan kegiatan penanaman padi seperti yang diharapkan. Kami tetap usahakan komunikasi petani dengan penyuluh dan antara petani tetap terjaga agar tidak ada masalah dan konflik nantinya
	b.	Fragmentasi	
	1)	Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan dari yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	sejauh ini hambatan koordinasi tidak terjadi dan program dapat berjalan dengan baik. Seluruh pihak yang terlibat dalam Program SL-PTT dapat <i>berkerja dengan harmonis</i>
			secara umum kegiatan dalam SL-PTT dapat berjalan lancar. Namun diakui kalau untuk koordinasi dengan petani di lapangan memang ada kendala. Kadang-kadang ada kala petani memerlukan bimbingan atau masalah dalam melakukan pengelolaan kebun
			secara ideal memang ada penyuluh yang tinggal di desa, namun kendala lain adalah belum ada rumah bagi penyuluh dan beberapa penyuluh bertugas lebih dari satu desa



**Lampiran 3**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : TAMARI  
**Jabatan** : KETUA KELOMPOK TANI RIAM BERSI BERSATU DESA GURUNG MALI  
**Waktu Wawancara** : 8 MEI 2014

1.	Komunikasi	
	a.	Transmisi Program
	1)	Apakah Program SL-PTT sudah pernah disosialisasikan? sosialisasi sudah pernah dilakukan oleh Dinas, dari penyuluh juga ada, kami setiap bulan ada latihan-latihan oleh pak penyuluh
	3)	Dimanakah sosialisasi dilaksanakan? Dulu pertama di balai desa, sesudah itu yang berikut-berikutnya langsung di ladangnya.
	4)	Bagaimana sosialisasinya dilaksanakan? Apakah tatap muka langsung? Langsung tatap muka bu.
	b.	Kejelasan
	1)	Apakah buku pedoman sudah pernah diberikan oleh Dinas terkait? Sudah pernah, ada satu buku petunjuk yang diberikan ke ketua kelompok taninya.
	c.	Konsistensi
	1)	Apakah tersedia penjelasan dan petunjuk-petunjuk teknis Program SL-PTT? Ndak ada
2.	Sumber Daya	
	a.	Staf
	1)	Bagaimana tingkat kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan menanam padi? Kalau petani ya udah biasalah menanam padi. Tapi dengan SL-PTT kami dilatih lebih pakai alat-alat dan obat-obatan untuk merawat padi
	2)	Apakah tenaga penyuluh telah cukup mendampingi petani? Cukup sebenarnya, tapi penyuluh kan ndak netap di desa karna belum ada segala rumah dinas disini. Tapi kalau bisa ya beliau ada di sini terus jadi kalau nanya lebih gampang.

	b.	Fasilitas	
	1)	Fasilitas apa saja yang di dapat dalam Program SL-PTT?	Yang didapat adalah segalan alat pertanian, segala benih dan uang. Tapi hanya untuk LL aja. Kalau anggota yang lain tu masih swadaya.
	c.	Informasi	
	1)	Apakah anda mempunyai cukup informasi mengenai bagaimana melaksanakan Program SL-PTT?	Kalau informasi yang dari luar cukup lancar karna sinyal HP ada, jadi kalau ada apa-apa yang harus cepat dibuat kami tahu.
	d.	Kewenangan	
	1)	Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas?	Sudah ada Surat dari Dinas yang menetapkan siapa-siapa yang terima bantuan dan kelompoknya.
3.		Disposisi	
	a.	Apakah anda menerima dan mendukung Program SL-PTT?	Iya saya mendukung
	b.	Apa harapan bapak terhadap Program SL-PTT ini?	Saya berharap ya mudah-mudahan produksi padi kami semakin bertambah
4.		Struktur Birokrasi	
	1)	Apakah Implementasi Program SL-PTT sudah ada <i>Standart Operating Procedures</i> (SOP)?	Sepertinya belum pak
	2)	Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	Tidak ada

Lampiran 3

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : JULUNG  
**Jabatan** : KETUA KELOMPOK TANI LEBAK SANKIM DESA GURUNG MALI  
**Waktu Wawancara** : 8 MEI 2014

1.	Komunikasi		
	a.	Transmisi Program	
		1) Apakah Program SL-PTT di pernah disosialisasikan?	sosialisasi sudah pernah dulu, orang dari dinas dan pak penyuluh juga membimbing petani
		2) Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi tersebut? Apakah dengan tatap muka?	Dengan tatap muka
	b.	Kejelasan	
		1) Apakah sudah ada buku petunjuk/ pedoman dalam Program SL-PTT?	ada
	c.	Konsistensi	
		1) Apakah ditemukan pertentangan-pertentangan peraturan dalam Program SL-PTT?	Tidak ada
2.	Sumber Daya		
	a.	Staf	
		1) Bagaimana kemampuan petani dalam melaksanakan penanaman padi?	Kalau petani pasti bisa karena sudah turun temurun nanam padi. Tapi lewat SL-PTT kan diberi tahu cara-cara baru sehingga hasil bisa lebih banyak waktu panen.
		2) Apakah tenaga penyuluh sudah cukup mendampingi petani di lapangan dalam Program SL-PTT?	Sudah bu.

	<b>b. Fasilitas</b>	
	1) Fasilitas apa saja yang diterima dalam Program SL-PTT ini di Lapangan?	Ada benih padi dan saprodi serta bantuan keuangan tapi langsung untuk belanja kebutuhan di kebun LL.
	2) Bagaimana ketersediaan lahan yang dipersyaratkan untuk SL-PTT?	Lahannya ada tapi yang satu hamparan agak susah
	<b>c. Informasi</b>	
	1) Apakah akses informasi mengenai bagaimana melaksanakan Program SL-PTT mudah diperoleh?	Kalau informasi biasanya pakai HP
	<b>d. Kewenangan</b>	
	Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas dalam bentuk SK?	Sudah ada
<b>3.</b>	<b>Disposisi</b>	
	a. Apakah anda menerima dan mendukung Program SL-PTT?	Kami mendukung
	b. Apa harapan Bapak terhadap Program SL-PTT ini?	Ya..saya berharap hasil panen nanti meningkat.
<b>4.</b>	<b>Struktur Birokrasi</b>	
	a. Standar Operational Procedures (SOP)	
	1) Apakah Program SL-PTT telah mempunyai <i>Standart Operating Procedures (SOP)</i> ?	belum
	2) Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	Tidak ada

**Lampiran 3**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : S. UJANG SUTOYO  
**Jabatan** : KETUA KELOMPOK TANI HARAPAN MAJU DESA GURUNG MALI  
**Waktu Wawancara** : 8 MEI 2014

1. Komunikasi		
a.	Transmisi Program	
1)	Apakah Program SL-PTT di pernah disosialisasikan?	Sudah pernah
2)	Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi tersebut? Apakah dengan tatap muka?	Tatap muka
3)	Dimanakah sosialisasi dilaksanakan?	Di balai desa sama di Ladang
b.	Kejelasan	
	Apakah ada buku petunjuk yang dipedomani dalam melaksanakan Program SL-PTT?	ada
c.	Konsistensi	
1)	Apakah ditemukan pertentangan-pertentangan peraturan dalam Program SL-PTT?	Belum ada
2. Sumber Daya		
a.	Staf	
1)	Bagaimana kemampuan petani dalam melaksanakan penanaman padi?	Kalau kemampuan petani sudah cukup baik
2)	Apakah tenaga penyuluh sudah cukup mendampingi petani di lapangan dalam Program SL-PTT?	sudah
b.	Fasilitas	
1)	Fasilitas apa saja yang diterima	Ada saprodi, benih dan lain-lain

		dalam Program SL-PTT ini di Lapangan?	
		2) Apakah perlatan dan saprodi tersebut sudah memadai untuk melaksanakan Program SL-PTT?	sebenarnya kami memerlukan saprodi yang memadai untuk menggarap lahan kami. Namun yang mendapat hanya aeral LL saja
		3) Bagaimana ketersediaan lahan yang dipersyaratkan untuk Program SL-PTT?	Lahannya ada.
<b>c. Informasi</b>			
		1) Apakah akses informasi mengenai bagaimana melaksanakan Program SL-PTT dapat diperoleh?	Bisa.
<b>d. Kewenangan</b>			
		1) Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas dalam bentuk SK?	Sudah ada SK dari Dinas Pertanian.
<b>3. Disposisi</b>			
	a.	Apakah anda menerima dan mendukung Program SL-PTT?	Ya kami menerima
	b.	Apa harapan Bapak terhadap Program SL-PTT ini?	Saya berharap SL-PTT ini semakin ditingkatkan sehingga kami selalu dapat bimbingan dalam menanam padi
<b>4. Struktur Birokrasi</b>			
	a.	Standar Operational Procedures (SOP)	
		1) Apakah Program SL-PTT telah mempunyai <i>Standart Operating Procedures (SOP)</i> ?	Tidak ada
		2) Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	Tidak ada



**Lampiran 3**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : SUMINDRA  
**Jabatan** : KETUA KELOMPOK TANI KITA BERSATU DESA GURUNG MALI  
**Waktu Wawancara** : 8 MEI 2014

1.	Komunikasi		
	a.	Transmisi Program	
		1) Apakah Program SL-PTT di pernah disosialisasikan?	Pernah
		2) Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi tersebut? Apakah dengan tatap muka?	Iya dengan tatap muka
		3) Dimanakah sosialisasi dilaksanakan?	Di balai desa
	b.	Kejelasan	
		1) Apakah ada buku petunjuk yang dipedomani dalam melaksanakan Program SL-PTT?	Sudah ada.
	c.	Konsistensi	
		1) Apakah ditemukan pertentangan-pertentangan peraturan dalam Program SL-PTT?	Tidak ada
2.	Sumber Daya		
	a.	Staf	
		1) Bagaimana kemampuan petani dalam melaksanakan penanaman padi?	Seluruh anggota kelompok tani sudah biasa menanam padi
		2) Apakah tenaga penyuluh sudah cukup mendampingi petani di lapangan dalam Program SL-PTT?	Sudah cukup, namun kami berharap kalau bisa dibuat rumah dinas bagi penyuluh agar dapat lebih sering di desa.
	b.	Fasilitas	

	1)	Fasilitasi apa saja yang diterima dalam Program SL-PTT ini di Lapangan?	Bantuan yang diberikan adalah bantuan benih, alat dan mesin pertanian, uang serta benih
	2)	Bagaimana ketersediaan lahan yang dipersyaratkan untuk Program SL-PTT?	sulit kalau mau mencari lahan untuk pertanian padi harus 24 atau 25 hektar dalam satu hamparan karena selain menanam padi, banyak petani lainnya yang menanam karet dan sawit
<b>c. Informasi</b>			
	1)	Apakah akses informasi mengenai bagaimana melaksanakan Program SL-PTT dapat diperoleh?	selama ini belum ada masalah ya untuk menghubungi penyuluh, beliau selalu dapat dihubungi melalui HP kecuali jika sedang tidak ada sinyal
<b>d. Kewenangan</b>			
	1)	Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas dalam bentuk SK?	Sudah ada
<b>3. Disposisi</b>			
	a.	Apakah anda menerima dan mendukung Program SL-PTT?	Ya kami mendukung sepenuhnya
	b.	Apa harapan Bapak terhadap Program SL-PTT ini?	Ya semoga hasil panen semakin meningkat dan pendapatan juga bertambah.
<b>4. Struktur Birokrasi</b>			
	a.	Standar Operational Procedures (SOP)	
	1)	Apakah Program SL-PTT telah mempunyai <i>Standart Operating Procedures</i> (SOP)?	Belum ada
	2)	Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	Belum ada

**Lampiran 3**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : AGUSTINUS  
**Jabatan** : KETUA KELOMPOK TANI PANGKAL MARSELUNG DESA GURUNG MALI  
**Waktu Wawancara** : 8 MEI 2014

1.		Komunikasi	
a.		Transmisi Program	
	1)	Apakah Program SL-PTT di pernah disosialisasikan?	Sudah pernah
	2)	Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi tersebut? Apakah dengan tatap muka?	Dengan tatap muka
	3)	Dimanakah sosialisasi dilaksanakan?	Sekali di balai desa, selanjutnya di ladang lahan LL
b.		Kejelasan	
	1)	Apakah ada buku petunjuk yang dipedomani dalam melaksanakan Program SL-PTT?	Buku Pedomannya sudah ada, setiap tahun selalu dapat dari Dinas dibawa sama bapak Penyuluh
c.		Konsistensi	
	1)	Apakah ditemukan pertentangan-pertentangan peraturan dalam Program SL-PTT?	Belum pernah
2.		Sumber Daya	
a.		Staf	
	1)	Bagaimana kemampuan petani dalam melaksanakan penanaman padi?	Para petani sudah biasa menanam padi jadi tidak ada masalah. SL-PTT hanya mengajarkan bagaimana cara bertani yang lebih baik dan menguntungkan.
	2)	Apakah tenaga penyuluh sudah	selama ini Petugas yang

		cukup mendampingi petani di lapangan dalam Program SL-PTT?	melakukan sosialisasi dan pembinaan, kemampuan dan komunikasinya sudah cukup baik, dan mereka mengunjungi kami tetapi kalo bisa petugas Penyuluh Lapangannya ditambah personilnya bu
	<b>b.</b>	<b>Fasilitas</b>	
		1) Fasilitas apa saja yang diterima dalam Program SL-PTT ini di Lapangan?	Bantuan yang diberikan berupa alat saprodi dan benih.
		2) Bagaimana ketersediaan lahan yang dipersyaratkan untuk Program SL-PTT?	Lahan untuk SL-PTT cukup tersedia.
	<b>c.</b>	<b>Informasi</b>	
		1) Apakah akses informasi mengenai bagaimana melaksanakan Program SL-PTT dapat diperoleh?	Selama informasi tidak terlalu sulit diperoleh.
	<b>d.</b>	<b>Kewenangan</b>	
		1) Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas dalam bentuk SK?	Sudah ada
<b>3.</b>		<b>Disposisi</b>	
	<b>a.</b>	Apakah anda menerima dan mendukung Program SL-PTT?	Kami sangat mendukung
	<b>b.</b>	Apa harapan Bapak terhadap Program SL-PTT ini?	motivasi kami ikut SLPTT ini adalah untuk kesejahteraan. Kalau produksi pertanian padi kami meningkat maka penghasilan kami juga bertambah sehingga bisa mencukupi biaya hidup bahkan nabung untuk sekolah anak nanti
<b>4.</b>		<b>Struktur Birokrasi</b>	
	<b>a.</b>	<b>Standar Operational Procedures (SOP)</b>	
		1) Apakah Program SL-PTT telah mempunyai <i>Standart Operating Procedures (SOP)</i> ?	Belum ada

	2) Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	Tidak ada
--	---	-----------



**Lampiran 3**

**Nama** : ALBINA SRIPARSA  
**NIM** : 018556715  
**Judul** : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH LAPANGAN PENGENALAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI TAHUN 2013 DI KABUPATEN SINTANG (STUDI DI DESA GURUNG MALI KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG)  
**Nama Yang Diwawancara** : HERANUS  
**Jabatan** : KETUA KELOMPOK TANI BARIYAU DESA GURUNG MALI  
**Waktu Wawancara** : 8 MEI 2014

1.	Komunikasi		
	a.	Transmisi Program	
		1)	Apakah Program SL-PTT di pernah disosialisasikan? sudah
		2)	Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi tersebut? Apakah dengan tatap muka? Tatap muka
		3)	Dimanakah sosialisasi dilaksanakan? Di balai desa
	b.	Kejelasan	
		1)	Apakah ada buku petunjuk yang dipedomani dalam melaksanakan Program SL-PTT? Sudah ada
		2)	Apakah penyuluh pernah memberikan penyuluhan atau menjelaskan isi buku pedoman? buku petunjuknya sudah pernah diberikan kepada kami, biasanya sih kalau awal mau mulai kegiatan ada kumpul dulu dengan pak penyuluh sambil menerangkan buku petunjuk
	c.	Konsistensi	
		1)	Apakah ditemukan pertentangan-pertentangan peraturan dalam Program SL-PTT? Belum ada selama ini
2.	Sumber Daya		
	a.	Staf	
		1)	Bagaimana kemampuan petani dalam melaksanakan penanaman padi? Kemampuan petani pada dasarnya sudah baik selama ini.
		2)	Apakah tenaga penyuluh sudah cukup mendampingi petani di lapangan dalam Program SL-PTT? Selama ini sudah cukup
	b.	Fasilitas	

	1)	Fasilitas apa saja yang diterima dalam Program SL-PTT ini di Lapangan?	yang dapat saprodi hanya untuk LL saja. Untuk para petani anggota harus mengusahakan saprodi masing-masing, areal LL hanya untuk percontohan mereka saja
	2)	Bagaimana ketersediaan lahan yang dipersyaratkan untuk Program SL-PTT?	Lahannya ada
	c.	Informasi	
	1)	Apakah akses informasi mengenai bagaimana melaksanakan Program SL-PTT dapat diperoleh?	Selama ini informasi cukup lancar. Kan sudah ada HP, kecuali kalau lagi tidak ada sinyal.
	d.	Kewenangan	
	1)	Apakah dalam implementasi Program SL-PTT ini sudah ada Pengaturan dan Pembagian Kewenangan dengan jelas dalam bentuk SK?	ada
3.	Disposisi		
	a.	Apakah anda menerima dan mendukung Program SL-PTT?	kami senang dengan program SL-PTT ini, kami berharap Program ini dapat terus ditingkatkan lagi
	b.	Apa harapan Bapak terhadap Program SL-PTT ini?	Mudah-mudahan dengan SL-PTT ini panen kami meningkat.
4.	Struktur Birokrasi		
	a.	Standar Operational Procedures (SOP)	
	1)	Apakah Program SL-PTT telah mempunyai <i>Standart Operating Procedures</i> (SOP)?	Sepertinya tidak ada
	2)	Apakah terdapat tindakan-tindakan atau kegiatan yang dapat menghambat koordinasi dalam Program SL-PTT?	Tidak ada

Lampiran 4

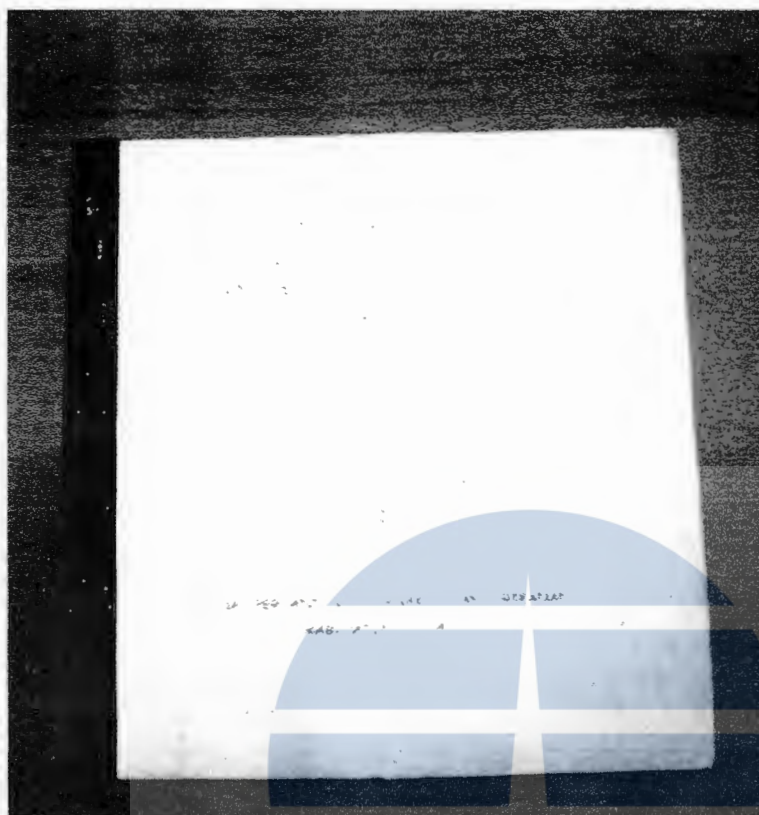


Photo 1. Buku Petunjuk Teknis SL-PTT Tahun 2012



Photo 2. Lahan Pertanian Sawah Kelompok Tani Program SL-PTT





Photo 3. Observasi Lahan Pertanian Kelompok Tani Program SL-PTT



Photo 4. Lahan Pertanian Kering Kelompok Tani Program SL-PTT

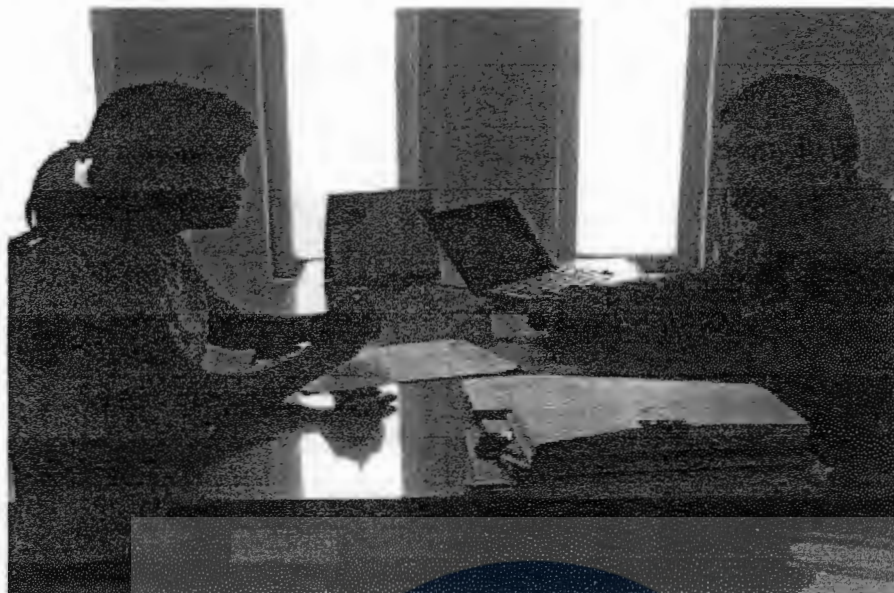


Photo 5. Wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**  
Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

**BIODATA**

Nama : ALBINA SRIPARSA  
NIM : 018556715  
Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 3 Oktober 1975  
Registrasi Perdana : 2012.2  
Riwayat Pendidikan : SD Panca Setya Sintang, lulus tahun 1987  
SMP Panca Setya Sintang , Lulus Tahun 1990  
SMA Panca Setya Sintang, Lulus Tahun 1993  
S-1 Universitas Panca Bhakti Pontianak, Lulus Tahun 1998  
Riwayat Pekerjaan : - Staf Kantor Kecamatan Sungai Tebelian tahun 2002 – 2004  
- Staf Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang tahun 2004 - 2009  
- Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan tahun 2009 – 2014  
- Kasubbag Program dan Keuangan Badan Lingkungan Hidup tahun 2014 - sekarang  
Alamat Tetap : Jalan Dharma Putra Kompleks Bumi Akcaya Permai Blok H/9 Sintang, Kalimantan Barat  
No. Telp/HP : 08125710411

Sintang, Februari 2016

**ALBINA SRIPARSA  
NIM. 018556715**